



SALINAN

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pemerintah Provinsi Jambi yang selanjut disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat di Daerah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
52. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
59. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
61. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
62. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
64. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
68. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB;

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi :
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 11

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.

- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang membidangi keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
 - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Khusus untuk waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah termasuk suami/istri ditetapkan tarif sebesar 0 % (nol persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 19

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi dari:
 1. Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun; atau
 2. Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali, meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. kegiatan kesenian tradisional yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka pelestarian budaya.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkir kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas penjualan Makanan dan/atau Minuman berupa ampera, kantin, warung tenda, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada:
 - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. hiburan rakyat yang memungut bayaran ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Saat terutang PBJT dihitung sejak saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PNBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat/ stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film/ *slide*; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 32

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 34

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 36

- (1) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang dipungut adalah di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5
PAT

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Yang dikecualikan dari objek adalah pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 38

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilandan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali, meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
- c. untuk keperluan lain yang secara jelas tidak dimanfaatkan bagi kepentingan komersil dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan/atau
- d. yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya sepanjang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 49

Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet;

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 56

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 57

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 61

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 63

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 64

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 65

- (1) Subjek pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 67

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 68

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 69

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, kecuali untuk BPHTB.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penerimaan Pajak Yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 70

- (1) Hasil penerimaan atas jenis Pajak:
- a. Opsen PKB;
 - b. PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. PAT.
- dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Hasil penerimaan atas jenis pajak dialokasikan paling sedikit :
- a. Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - b. Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
 - c. Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - 1) penanaman pohon;
 - 2) pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - 4) pengelolaan limbah.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 71

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 72

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan Bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan Bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan gedung.
- (2) Harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (3) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan Bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan Bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan gedung.
- (4) Harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.

Pasal 74

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah pemotongan hewan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 79

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 76 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 80

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi khusus untuk layanan :
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)/Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan indeks lokalitas.
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2
Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 82

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan

Pasal 83

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 4
Pelayanan Kebersihan

Pasal 84

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecuali pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 5
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 85

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Pelayanan Pasar

Pasal 86

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 87

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 8
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 88

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha

Pasal 91

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,
Hasil Bumi, dan Hasil Hutan

Pasal 92

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Paragraf 5
Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 93

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6
Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/vila

Pasal 94

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 7
Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Pasal 95

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 8
Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf f adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 9
Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang
Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 97

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf g adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 10
Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 98

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf h adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 11
Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pasal 99

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Paragraf 12
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 13
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 101

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Kelima Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Jenis Pelayanan

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Paragraf 2
Pelayanan Pemberian PBG

Pasal 104

- (1) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan Bangunan gedung, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan Bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. persetujuan Bangunan gedung perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung; terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung; cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung; yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. persetujuan Bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3
Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 105

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif

Pasal 106

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 5
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 107

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 109

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

- (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 111

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan; dan
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 112

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
 PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
 PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 113

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kondisi tertentu objek Pajak atau Retribusi yang ada hubungannya dengan subjek pajak retribusi;
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi berpenghasilan rendah sehingga kewajiban sulit dipenuhi; dan/atau
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban;
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. kondisi objek yang sangat terbatas, golongan tertentu, dan nilai objek sampai dengan batas tertentu;
 - b. dalam hal terkena bencana alam; dan/atau
 - c. sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 114

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, berupa objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 115

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 116

- (1) Setiap pejabat Daerah berkewajiban menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak.
- (2) Menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tidak memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak juga berlaku terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (4) Menjaga kerahasiaan data Wajib Pajak dikecualikan pada kondisi:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 119

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 120

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 90 dan Pasal 103 sehingga merugikan Keuangan, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 121

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dan Pasal 120 merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 115, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 124

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 02);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 4);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 6);
- f. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 7);
- g. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 8);
- h. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 9);
- i. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 5, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2012 Nomor 10);

- m. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 1);
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 5);
- o. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Produk Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 2) ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 29 - 1 - 2024
Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 29 - 1 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN : (1 - 8 /2024)



Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Alex Sander Mandala Putra, SH
NIP. 19751208 200501 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Esensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah harus mampu menjamin kemakmuran rakyat, peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang. Salah satu yang dikembangkan dalam prinsip pemberian otonomi daerah adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom. Kemandirian daerah otonom diwujudkan melalui penyerahan urusan pemerintahan konkuren kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan. Sumber pendanaan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan kemampuan daerah maka peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai dengan melakukan pemungutan yang lebih tertib dan intensif terhadap sumber-sumber yang ada.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada daerah untuk memungut Pajak daerah dan Retribusi daerah melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyederhanaan Retribusi daerah dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, yang diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah atas jenis Objek Retribusi yang disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi bertujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Peraturan daerah ini mengatur Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah dalam bentuk kodifikasi (himpunan). Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini mengenai Pajak daerah, Retribusi daerah, pemanfaatan penerimaan Retribusi, pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak daerah

dan Retribusi daerah, pemberian fasilitas Pajak daerah dan Retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi, pengembalian kelebihan pembayaran, insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi daerah, elektronifikasi pembayaran Pajak daerah dan Retribusi daerah, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lalu raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis” adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten misalnya, Kabupaten Merangin dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau Penyerahan Makan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan “persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha, seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “jasa parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah” adalah jasa parkir yang memang disediakan secara gratis.

- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga, seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis/badminton, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas
- Huruf l
Cukup jelas

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c

Pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah juga mencakup pagelaran kesenian yang diselenggarakan oleh BUMN/BUMD.

Pasal 26

Ayat (1)

- Cukup jelas

Ayat (2)
Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Pembelian makanan dan/atau minuman yang menggunakan dana APBN/APBD dikecualikan dari tarif khusus.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik adalah pada saat masa kampanye yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi J sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
 - a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$
 - b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = \text{Rp } 16 \text{ juta}$Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan.

BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi J, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi J adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam

SKPDPKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = 1% x Rp 300 juta = Rp 3 juta

b. Opsen PKB terutang = 66% x Rp 3 juta = Rp 2 juta

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang - 93 - dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasibarang milikdaerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ketentuan ini menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 127

Cukup jelas

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN :

A. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan

| Struktur | | Tarif | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. | Rawat Jalan : | | |
| | a. Pemeriksaan calon pengantin (2 org) | Rp | 20.000 /1 x kunjungan |
| | b. Konsultasi gizi | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| | c. Konsultasi Sanitasi | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| | d. Konsultasi gigi | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| | e. Konsultasi keswa | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| | f. Konsultasi bumi/busui | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| | g. Konsultasi bayi dan balita | Rp | 15.000 /1 x kunjungan |
| 2. | Poli Umum : | | |
| | a. Injeksi | Rp | 5.000 /kali |
| | b. Pemeriksaan Spirometri | Rp | 25.000 |
| | c. Ganti/Pasang Perban : | | |
| | - Kecil | Rp | 3.000 /tindakan |
| | - Sedang | Rp | 6.000 /tindakan |
| | - Besar | Rp | 10.000 /tindakan |
| | d. Pemeriksaan dalam rangka penertiban surat keterangan/KIR Kesehatan | | |
| | - Umum | Rp | 30.000 |
| | - Pelajar | Rp | 10.000 |
| | - Calon Haji : | | |
| | '- Tahap pertama di Puskesmas | Rp | 20.000 |
| | '- Tahap Kedua di Dinas | Rp | 50.000 |
| | - Karyawan Salon/Hotel, | Rp | 50.000 |
| | - Penjamah makanan : | | |
| | '- Warung makan/kantin | Rp | 20.000 |
| | '- Rumah makan | Rp | 30.000 |
| | '- Restoran | Rp | 50.000 |
| | e. Pemeriksaan KIR Kematian | Rp | 30.000 |
| | f. Surat Keterangan Bebas Narkoba | Rp | 50.000 |
| | g. Sircumsisi | Rp | 200.000 |
| | h. Pelayanan Dokter Spesialis | Rp | 100.000 |
| | i. Rawat Jalan Kunjungan rumah | Rp | 50.000 |
| 3. | Poli KIA : | | |
| | a. Penanganan efek samping (alat KB IUD + implan, KB lain cukup pemeriksaan fisik diognotic saja) | Rp | 50.000 /1 x kunjungan |
| | - Tindik | Rp | 20.000 /1 x kunjungan |

| | | |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|
| | b. Pelayanan berupa tindakan medik : | |
| | - Suntik KB | Rp 25.000 /1 x kunjungan |
| | - Angkat IUD | Rp 150.000 /1 x kunjungan |
| | - Pemasangan IUD | Rp 100.000 /1 x kunjungan |
| | - Angkat KB susuk | Rp 150.000 /1 x kunjungan |
| | - Pemasangan KB susuk | Rp 80.000 /1 x kunjungan |
| | c. Biaya bersalin : | |
| | - Persalinan biasa/normal | Rp 1.000.000 /1 x kunjungan |
| | - Persalinan sulit/patologis | Rp 1.200.000 /1 x kunjungan |
| | d. Curratage : | |
| | - Curratage pasca salin | Rp 500.000 /1 x kunjungan |
| | - Curratage Abortus | Rp 450.000 /1 x kunjungan |
| | e. Pemeriksaan IVA Test | Rp 55.000 /1 x kunjungan |
| 4. | Poli Gigi : | |
| | a. Pengobatan atau tindakan Gigi : | |
| | - Perawatan abses | Rp 30.000 /gigi |
| | - Perawatan periodental | Rp 30.000 /gigi |
| | - Cabut gigi tetap | Rp 25.000 /gigi |
| | - Cabut gigi tetap dengan penyulit | Rp 35.000 /gigi |
| | - Cabut gigi susu | Rp 20.000 /gigi |
| | - Cabut gigi susu dengan komplikasi | Rp 30.000 /gigi |
| | - Pembersihan karang gigi tiap rahang | Rp 50.000 /gigi |
| | - Reposisi mandibula | Rp 50.000 /gigi |
| | - Tambalan sementara | Rp 40.000 /gigi |
| | - Tambalan tetap | Rp 50.000 /gigi |
| 5 | UGD : | |
| | a. Visum luar korban hidup | Rp 60.000 /tindakan |
| | b. Visum luar korban mati | Rp 150.000 /tindakan |
| | c. Pembuangan seruman | Rp 35.000 /tindakan |
| | d. Klisma | Rp 50.000 /tindakan |
| | e. Pasang kateter | Rp 30.000 /tindakan |
| | f. Pasang infus dewasa | Rp 15.000 /tindakan |
| | g. Pasang infus anak-anak | Rp 25.000 /tindakan |
| | h. Pasang spalak : | |
| | - Kecil | Rp 15.000 /tindakan |
| | - Sedang | Rp 20.000 /tindakan |
| | - Besar | Rp 25.000 /tindakan |
| | i. Pasang NGT | Rp 35.000 /tindakan |
| | j. RJP (resusitasi jantung paru) | Rp 50.000 /tindakan |
| | k. Amputasi jari | Rp 50.000 /jari |
| | l. Fungis supra pubik | Rp 30.000 /tindakan |
| | m. Jahit tendon otot | Rp 150.000 /tindakan |
| | n. Incisi abses kecil | Rp 30.000 /tindakan |
| | o. Incisi abses besar | Rp 80.000 /tindakan |
| | p. Ekterpati lipom kecil | Rp 150.000 /tindakan |
| | q. Ekterpati lipom sedang | Rp 200.000 /tindakan |
| | r. Ekterpati corpus | |
| | - Mata | Rp 35.000 /tindakan |
| | - Telinga | Rp 35.000 /tindakan |
| | - Hidung | Rp 35.000 /tindakan |
| | s. Nekrotomi | Rp 35.000 /tindakan |
| | t. Ekstraksasi kuku | Rp 30.000 /tindakan |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | u. Perawatan luka bakar : | |
| | - Perawatan luka bakar < 10% | Rp 30.000 /kali |
| | - Perawatan luka bakar > 10% | Rp 50.000 /kali |
| | v. Pertolongan pertama pada kecelakaan | |
| | - Jahit luka 1 s/d 5 | Rp 25.000 /kali |
| | - Jahir luka 6 s/d 10 | Rp 30.000 /kali |
| | - Jahit luka > 10 (setiap kenaikan range 5 jahitan) | Rp 10.000 /kali |
| | w. Buka jahitan | Rp 10.000 /kali |
| | x. Debridemen luka | Rp 20.000 Max 4 jam |
| | y. Observasi | Rp 50.000 max 24 jam |
| 6. | Penunjang diagnostik : | |
| | a. USG | Rp 140.000 /tindakan |
| | b. EKG | Rp 50.000 /tindakan |
| 7. | Rawat Inap : | |
| | a. Biaya rawat inap | Rp 200.000 /hari |
| | b. Pemasangan infus dewasa | Rp 15.000 /kali |
| | c. Pemasangan infus anak-anak | Rp 25.000 /kali |
| | d. Injeksi | Rp 3.000 /kali |
| | e. Asuhan keperawatan | Rp 15.000 /kali |
| | f. Rawat inpa bayi baru lahir | Rp 70.000 sesuai kelas rawat |
| | g. Visit dokter | Rp 15.000 /kunjungan max 2 kali |
| | h. Konsultasi Dokter umum | Rp 15.000 sesuai permintaan pasien |
| | i. Biaya Dokter jaga | Rp 75.000 /Shif |
| | j. Biaya perawat jaga | Rp 40.000 /shif per org |
| | k. Asuhan Kebidanan | Rp 15.000 |
| | l. Asuhan Gizi | Rp 10.000 |
| 8. | Pemakaian Oksigen : | Rp 3.000 /liter |
| 9. | Pemakaian Nebulizer : | Rp 35.000 sekali pakai |
| 10. | Pelayanan Inovasi : | |
| | a. Akupuntur | Rp 50.000 |
| | b. Akupresurre | Rp 25.000 |
| | c. Totok berhenti merokok | Rp 25.000 |
| | d. Pijat refleksi | Rp 25.000 |
| | e. Fisioterapi | Rp 50.000 |
| | f. Pijat Bayi | Rp 25.000 |
| 11. | Pemakaian Mobil Ambulan : | |
| | a. Pemakaian s/d jarak 10 KM | Rp 100.000 /jarak tempuh dihitung PP |
| | b. Pemakaian jarak > 10 KM (tambahan tiap KM) | Rp 4.000 |
| 12. | Pelayanan Jenazah : | |
| | a. Perawatan | Rp 150.000 |
| | b. Formalin pada jenazah | Rp 1.000.000 /per liter |
| 13. | Laboratorium Penunjang : | |
| | Sederhana : | |
| | a. Darah : | /tindakan (kecuali bumil) |
| | - Haemoglobin | Rp 20.000 / slide |

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| - Hitung eritrosis | Rp 20.000 / slide |
| - LED/BBS | Rp 20.000 / slide |
| - Hitung retikosit | Rp 20.000 / slide |
| - Trombosis | Rp 20.000 / slide |
| - Lekosit | Rp 20.000 / slide |
| - Diffcount | Rp 20.000 / slide |
| - CT | Rp 20.000 / slide |
| - BT | Rp 20.000 / slide |
| - HT | Rp 20.000 / slide |
| b. Urine : | |
| - Protein | Rp 20.000 / slide |
| - Reduksi | Rp 20.000 / slide |
| - Bilirubin | Rp 20.000 / slide |
| - Redemin | Rp 20.000 / slide |
| - Urobilinogen | Rp 20.000 / slide |
| - Urobilin | Rp 20.000 / slide |
| - Stercobilin | Rp 20.000 / slide |
| - Darah samar | Rp 20.000 / slide |
| - Keton | Rp 20.000 / slide |
| Sedang : | |
| a. Malaria | Rp 15.000 |
| b. Golongan Darah : | |
| - Anak sekolah | Rp 15.000 |
| - Dewasa | Rp 20.000 |
| c. BTA | Rp 20.000 |
| d. Pemeriksaan TCM | Rp 25.000 |
| e. Tes Kehamilan | Rp 15.000 |
| f. Tes Sensitivitas | Rp 15.000 |
| g. Sperma analisa | Rp 75.000 |
| h. Pemeriksaan Secret (preparat bakteri dan jamur) | Rp 50.000 |
| Kimia darah : | |
| a. Glukosa | Rp 30.000 |
| b. Kolesterol | Rp 40.000 |
| c. SGOT | Rp 40.000 |
| d. SGPT | Rp 40.000 |
| e. Asam urat | Rp 35.000 |
| f. Hbs Ag | Rp 40.000 |
| g. Billirubin | Rp 35.000 |
| h. Trigleserida | Rp 35.000 |
| i. Ureum | Rp 35.000 |
| j. Kreatinin | Rp 60.000 |
| k. DBD liG/IgM | Rp 160.000 |
| l. DBD NS 1 | Rp 180.000 |
| m. HDL | Rp 40.000 |
| n. LDL | Rp 40.000 |
| o. Albumin | Rp 40.000 |
| p. Total Protein | Rp 40.000 |
| q. HIV/AIDS | Rp 75.000 |
| r. Widal | Rp 40.000 |
| s. Sphilis | Rp 80.000 |
| t. Gama GT | Rp 40.000 |

| | | |
|----|------------------------------------------------------|--------------------|
| | Tes Narkoba : | |
| | a. Amphetamin | Rp 50.000 |
| | b. Metamfetamin | Rp 50.000 |
| | c. Kokain | Rp 50.000 |
| | d. Kanabinoid | Rp 50.000 |
| | e. Opiat (heroin) | Rp 50.000 |
| | f. Barbiturat | |
| | g. Benzodiazepin | |
| | Pemeriksaan Kimia klinik : | |
| | a. T1 | Rp 110.000 |
| | b. T2 | Rp 110.000 |
| | c. TSH | Rp 110.000 |
| | Pemeriksaan darah analyzer | Rp 85.000 |
| | Pemeriksaan Urine lengkap | Rp 50.000 /sampel |
| | Pemeriksaan Faeces lengkap | Rp 20.000 /sampel |
| | Pemeriksaan Ceryotherafi | Rp 100.000 /sampel |
| 14 | Bidang Kimia Air : | |
| | a. Peralatan lapangan untuk pengambilan sampel air : | |
| | - Botol steril sampel air mikrobiologi | Rp 15.000 |
| | - Botol BOD | Rp 10.000 |
| | b. Kategori sederhana : | |
| | - Bau | Rp 10.000 |
| | - Rasa | Rp 10.000 |
| | - Suhu | Rp 10.000 |
| | - warna | Rp 10.000 |
| | - Kejernihan | Rp 10.000 |
| | - pH | Rp 10.000 |
| | c. Sedang : | |
| | - Zat tersuspensi (TSS) | Rp 40.000 |
| | - Zat Padat terlarut (TDS) | Rp 40.000 |
| | - Oksigen terlarut | Rp 40.000 |
| | - CO2 Agresif | Rp 40.000 |
| | - BOD | Rp 40.000 |
| | - Amoniak Bebas (CH3-N) | Rp 40.000 |
| | - Iron (Fe) | Rp 40.000 |
| | - Florida (F) | Rp 40.000 |
| | - Clorida (Cl) | Rp 40.000 |
| | - Mangan (Mn) | Rp 40.000 |
| | - Nitrat (NO3) | Rp 40.000 |
| | - Nitrit (NO2) | Rp 40.000 |
| | - Sulfat (SO4) | Rp 40.000 |
| | - COD | Rp 40.000 |
| 15 | Pemeriksa air : | |
| | a Pemeriksaan kimiawi air minum | |
| | - Lengkap bagi perusahaan/komersil | Rp 580.000 |
| | - Lengkap bagi perorangan/rumah tangga | Rp 440.000 |
| | b Pemeriksa bakteriologi air minum : | |
| | - MPN E.Coli | Rp 100.000 |
| | - MPN Coliform | Rp 100.000 |

B. BLUD RSUD Kol.Abundjani Bangko

| Struktur/Tindakan | | Tarif | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | RAWAT JALAN : | | |
| | Tindakan Medik di Poliklinik/Tindakan lainnya : | Penambahan pelayanan yang merupakan rincian dan detail rincian objek tindakan medik di poli/tindakan medik lainnya di atur dalam Peraturan Bupati | |
| | a. | Tindakan di Poliklinik Umum : | |
| | | - Pasang tindik bayi | Rp 25.000 |
| | | - Injeksi | Rp 25.000 |
| | | - Membuang Serumen (kotoran telinga) | Rp 50.000 |
| | b. | Tindakan medik Poliklinik Kebidanan : | |
| | | - Injeksi KB | Rp 25.000 |
| | | - Angkat IUD | Rp 150.000 |
| | | - Visum perkosaan | Rp 100.000 |
| | | - Pemasangan IUD | Rp 100.000 |
| | | - Biopsi | Rp 150.000 |
| | | - Pap Smear | Rp 150.000 |
| | | - Angkat KB Susuk | Rp 150.000 |
| | | - Pemasangan KB Susuk | Rp 150.000 |
| | | <i>NB : Jika Rumah Sakit tidak mendapatkan Subsidi alat kontrasepsi dari pemerintah maka pembelian alat kontrasepsi dibebankan kepada Pasien</i> | |
| | c. | Tindakan medik Poliklinik Anak : | |
| | | - Injeksi Vaksin | Rp 25.000 |
| | | - Cerument (Bayi/Anak) | Rp 50.000 |
| | | - Mantouq Test | Rp 200.000 |
| | | <i>NB : Jika Rumah Sakit tidak mendapatkan Subsidi vaksin dari pemerintah maka pembelian vaksin dibebankan kepada Pasien</i> | |
| | d. | Tindakan medik Poliklinik Bedah : | |
| | | - Menjahit luka ukuran 1-5 cm | Rp 50.000 |
| | | - Menjahit luka ukuran 6-10 cm | Rp 75.000 |
| | | - Menjahit luka ukuran 11-15 cm | Rp 100.000 |
| | | - Menjahit luka ukuran > 16 cm | Rp 125.000 |
| | - Luka Bakar < 10% + perawatan | Rp 75.000 | |
| | - Luka Bakar > 10% + perawatan | Rp 150.000 | |
| | - Ekstraksi kuku/Roserplasty | Rp 100.000 | |
| | - Expiorasi Luka | Rp 100.000 | |
| | - Nekrotomi | Rp 150.000 | |
| | - Exterpatie Kista Aherom | Rp 175.000 | |
| | - Exterpatie Corpus Alienum Kecil | Rp 50.000 | |

| | | | | |
|----|---|------------------------------------------------------|----|---------|
| | | - Exterpatie Corpus Alienum Besar | Rp | 125.000 |
| | | - Circumsisi | Rp | 300.000 |
| | | - Exterpatie Lipom Kecil | Rp | 150.000 |
| | | - Exterpatie Lipom Besar | Rp | 250.000 |
| | | - Incisi Absen besar | Rp | 50.000 |
| | | - Incisi Absen kecil | Rp | 75.000 |
| e. | | Tindakan medik Poliklinik Gigi : | | |
| | 1 | <i>Tindakan Non Spesialistik :</i> | | |
| | | a. Perawatan Absces | Rp | 80.000 |
| | | b. Perawatan Periodenta | Rp | 80.000 |
| | | c. Pencabutan Gigi Susu | Rp | 80.000 |
| | | d. Pencabutan Gigi Permanent | Rp | 100.000 |
| | | e. Pencabutan Gigi Permanent dengan komplikasi/sulit | Rp | 150.000 |
| | | f. Pembersihan karang gigi | Rp | 120.000 |
| | | g. Penambalan gigi sementara | Rp | 80.000 |
| | | h. Alveolektomy perkuadran | Rp | 250.000 |
| | | i. Reparasi mandibula | Rp | 100.000 |
| | | j. Reparasi Prothesa | Rp | 100.000 |
| | | k. Apicoektomi | Rp | 300.000 |
| | | l. Pembedahan gigi terpendam | Rp | 300.000 |
| | | m. Penambalan gigi tetap/permanen : | | |
| | | '- <i>Ambalgam</i> | Rp | 100.000 |
| | | '- <i>Glasiyonomer</i> | Rp | 100.000 |
| | | n. Penambalan gigi tetap/permanen dengan sinar : | | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp | 120.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp | 180.000 |
| | | o. Bongkar tambalan lama | Rp | 60.000 |
| | | p. Pemasangan gigi palsu | Rp | 225.000 |
| | | q. Fixasi Sederhana | Rp | 60.000 |
| | | r. Perawatan saluran akar (Perkunjungan) : | Rp | 100.000 |
| | | s. Pembuatan Mahkota 1 gigi | | |
| | | '- <i>Ackrylik crown/Jacket crown</i> | Rp | 100.000 |
| | | t. Pemeriksaan Dokter Gigi | Rp | 35.000 |
| | 2 | <i>Tindakan Spesialistik :</i> | | |
| | | a. Pembersihan karang gigi anak | Rp | 150.000 |
| | | b. Pencabutan gigi permanen anak | Rp | 100.000 |
| | | c. Pencabutan gigi susu anak | Rp | 100.000 |
| | | d. Pulpektomi gigi susu/permanen : | | |
| | | '- <i>Trepanasi/open akses</i> | Rp | 60.000 |
| | | '- <i>Preparasi biomekanis</i> | Rp | 100.000 |
| | | '- <i>Pengisian</i> | Rp | 100.000 |
| | | '- <i>Penambalan sementara</i> | Rp | 100.000 |

| | | | |
|----|---|---------------------------------------------------|--------------|
| | | e. Penambalan tetap : | |
| | | '- Resinkomposit | Rp 150.000 |
| | | '- GIC | Rp 150.000 |
| | | '- Almalgam | Rp 100.000 |
| | | f. Pemasangan mahkota SSC | Rp 250.000 |
| | | g. Pemasangan Kacket Crown | Rp 250.000 |
| | | h. Pemasangan PCC/gigi | Rp 200.000 |
| | | i. Insisi/Eksisi | Rp 150.000 |
| | | j. Pemasangan alat ortodontik cekat/rahang | Rp 2.000.000 |
| | | k. Pemasangan alat lepasan/rahang | Rp 500.000 |
| | | l. Kontrol orthocekat | Rp 30.000 |
| | | m. Kontrol lepasan | Rp 20.000 |
| | | n. Hilang braket 1 | Rp 50.000 |
| | | o. Pergantian NITI | Rp 50.000 |
| f. | | Tindakan medik Poliklinik Penyakit Dalam : | |
| | | 1. Pungsi Pleura | Rp 150.000 |
| | | 2. Pungsi Asites | Rp 150.000 |
| | | 3. Pungsi cairan sendi | Rp 150.000 |
| | | 4. Pleura Tap Therapetik | Rp 500.000 |
| | | 5. Aspirasi Abses pd Abses Hepar | Rp 500.000 |
| | | 6. Injeksi Intra artikular | Rp 410.000 |
| | | 7. EKG | Rp 80.000 |
| g. | | Tindakan medik Poliklinik THT : | |
| | 1 | <i>Tindakan Sederhana :</i> | |
| | | a. Ekstraksi Serumen | Rp 40.000 |
| | | b. Cuci telinga | Rp 40.000 |
| | | c. Tampon Telinga/ aff tampon | Rp 40.000 |
| | | d. Fungsi dan insisi hematoma | Rp 125.000 |
| | | e. Pemasangan gipsona telinga | Rp 125.000 |
| | | f. Audiometri | Rp 100.000 |
| | | g. Tympanometri | Rp 100.000 |
| | | h. Swab telinga | Rp 40.000 |
| | | i. Ekstaksi/ektirpasi massa (granulektomi) | Rp 175.000 |
| | | j. Fitting ABD (alat bantu dengar) | Rp 100.000 |
| | | k. Parasentesa gendang telinga | Rp 100.000 |
| | | l. Pacht test | Rp 100.000 |
| | 2 | <i>Hidung :</i> | |
| | | a. Ekstraksi korpus alienum | Rp 50.000 |
| | | b. Ekstraksi korpus alienum sulit | Rp 75.000 |
| | | c. Nasal toilet | Rp 40.000 |
| | | d. Cuci Hidung | Rp 100.000 |
| | | e. Cuci Sinus | Rp 100.000 |
| | | f. Swab Hidung | Rp 40.000 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| | | g. Pasang tampon anterior | Rp 50.000 |
| | | h. Pasang tampon bellocq | Rp 100.000 |
| | | i. Insisi + drainase abses septum hidung | Rp 100.000 |
| | 3 | <i>Tenggorokan :</i> | |
| | | a. Apus tenggorokan | Rp 40.000 |
| | | b. Corpus alineum | Rp 75.000 |
| | | c. Corpus alineum sulit | Rp 200.000 |
| | | d. Insisi + drainase abses peritonsil | Rp 250.000 |
| | | e. Kaustik faring | Rp 100.000 |
| | 4 | <i>Tes Alergi</i> | Rp 250.000 |
| | | a. Tes Tempel | Rp 30.000 |
| | | b. Ekstrak makanan | Rp 30.000 |
| | | c. Sekaligus ad.1 dan 2 | Rp 70.000 |
| | | d. Biopsi telinga/hidung/tenggorokan | Rp 250.000 |
| | | e. Suntik kortikosteroid | Rp 25.000 |
| | | f. Endoskopi (perkali) | Rp 150.000 |
| | | g. Tes keseimbangan sederhana | Rp 100.000 |
| | | h. Pemeriksaan dix hallpike dan terapi CRP | Rp 150.000 |
| | | i. Insisi abses kecil | Rp 50.000 |
| | | j. Insisi abses sedang | Rp 80.000 |
| | | k. Insisi abses besar | Rp 125.000 |
| | | l. Hecting dan aff hecting (perkali) | Rp 20.000 |
| h. | Tindakan Pemeriksaan Rehab medik/Fisiotherafi : | | |
| | | 1. Pemakaian Alat Sederhana | Rp 60.000 |
| | | 2. Pemakaian alat Sedang | Rp 75.000 |
| | | 3. Pemakaian Alat Canggih | Rp 100.000 |
| | <i>NB : Jika Pasien tanpa kiriman dokter maka jasa dokter menjadi hak Fisioterapis setiap pemakaian 1 x alat exercise ditambah Rp.7.500,- untuk jasa Fisioterapis</i> | | |
| i. | Tindakan Akupuntur : | | |
| | | 1. Akupuntur medik (Needle/Moxsa) | Rp 50.000 |
| | | 2. Akupuntur asetetik | Rp 50.000 |
| | | 3. Electro Akupuntur | Rp 50.000 |
| | | 4. Pemeriksaan kesehatan Jasmani | Rp 35.000 |
| j. | Tindakan Pulmonologi : | | |
| | | 1. Spirometri | Rp 250.000 |
| | | 2. Bronkoskopi | Rp 2.000.000 |
| | | 3. Biopsi dengan jarum core | Rp 1.000.000 |
| | | 4. TTNA | Rp 1.000.000 |
| | | 5. BJH/FNAB | Rp 500.000 |
| | | 6. Biopsi Pelura | Rp 700.000 |
| | | 7. Pleurodesis | Rp 600.000 |
| | | 8. Punksi pleura | Rp 150.000 |
| | | 9. WSD | Rp 1.000.000 |
| | | 10. Nebulisasi | Rp 50.000 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| k. | Tindakan medik Poliklinik Mata : | | | |
| | 1. | Resep Kacamata | Rp 60.000 | |
| | 2. | Epilasi (cabut bulu mata) | Rp 50.000 | |
| | 3. | Tes buta warna | Rp 50.000 | |
| | 4. | Tonometri kontak (Schiotz) | Rp 65.000 | |
| | 5. | Biometri & Keratometri | Rp 150.000 | |
| | 6. | Funduskopi | Rp 60.000 | |
| | 7. | Angkat Jahitan | Rp 100.000 | |
| | 8. | Ekstraksi korpus alienum konjungtiva | Rp 100.000 | |
| | 9. | Ekstraksi korpus alienum kornea | Rp 150.000 | |
| | 10. | Anel test | Rp 85.000 | |
| | 11. | Debridement kornea | Rp 50.000 | |
| | 12. | Redressing post op | Rp 50.000 | |
| | 13. | Spooling bola mata | Rp 50.000 | |
| | 14. | Injeksi triamsinilon (steroid) | Rp 75.000 | |
| | 15. | Ekstirpasi lithiasis | Rp 80.000 | |
| | 16. | Gonioskopi | Rp 100.000 | |
| | 17. | Tonometri non kontak | Rp 100.000 | |
| 18. | Nd Yag Laser PCO | Rp 100.000 | | |
| 1. | Tindakan Operasi mata rawat Jalan | | | |
| | 1. | Pteregium | Rp 2.500.000 | |
| | 2. | Khalazion/hordeolum | Rp 1.500.000 | |
| | 3. | Tumor kelopak mata | Rp 2.000.000 | |
| | 4. | Tumor adneksa | Rp 2.500.000 | |
| | 5. | Tumor konjungtiva | Rp 1.500.000 | |
| | 6. | Phacoemulsifikasi | Rp 7.000.000 | |
| | 7. | Trabekulektomi | Rp 6.000.000 | |
| | 8. | Reposisi iris | Rp 3.000.000 | |
| | 9. | Implant IOL sekunder | Rp 4.000.000 | |
| | 10. | Reposisi IOL | Rp 3.500.000 | |
| | 11. | Repair simblefaron | Rp 3.000.000 | |
| | 12. | Repair ruptur palpebra | Rp 3.000.000 | |
| 13. | Repair kanalis lakrimalis | Rp 4.000.000 | | |
| m. | Tindakan medik Poli Kulit dan Kelamin : | | | |
| | 1 | <i>Electro Cauter :</i> | | |
| | | a. Keratosi Seberoik : | | |
| | | '- Kecil | Rp 200.000 | |
| | | '- Sedang | Rp 400.000 | |
| | | '- Besar | Rp 500.000 | |
| | | b. Papiloma : | | |
| | | '- Kecil | Rp 200.000 | |
| | | '- Sedang | Rp 450.000 | |
| | | '- Besar | Rp 600.000 | |

| | | | |
|--|----|---------------------------------|------------|
| | | c. Siringoma/xantelasma : | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 300.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 500.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 650.000 |
| | | d. Veruca Vulgaris : | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 200.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 450.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 600.000 |
| | | e. Calus/calvus : | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 200.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 450.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 600.000 |
| | | f. Condiloma Acuminata : | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 350.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 500.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 800.000 |
| | 2 | <i>Injeksi Intralesi</i> | Rp 150.000 |
| | 3 | <i>Larva Migrain</i> | Rp 50.000 |
| | 4 | <i>Totol TCA</i> | Rp 200.000 |
| | 5 | <i>Skin Tag :</i> | |
| | | a. <i>Kecil</i> | Rp 200.000 |
| | | b. <i>Sedang</i> | Rp 400.000 |
| | | c. <i>Besar</i> | Rp 500.000 |
| | 6 | <i>Tandur Kulit :</i> | Rp 750.000 |
| | | a. <i>Komedo :</i> | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 50.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 100.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 150.000 |
| | | b. <i>Moluscom :</i> | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 50.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 100.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 150.000 |
| | | c. <i>Milia :</i> | |
| | | '- <i>Kecil</i> | Rp 50.000 |
| | | '- <i>Sedang</i> | Rp 100.000 |
| | | '- <i>Besar</i> | Rp 150.000 |
| | n. | Tindakan Psikologi : | |
| | 1. | Tes Kecerdasan sederhana | Rp 150.000 |
| | 2. | Tes Kecerdasan sedang | Rp 200.000 |
| | 3. | Tes Kecerdasan kompleks | Rp 250.000 |
| | 4. | Tes bakat, minat dan penjurusan | Rp 200.000 |
| | 5. | Evaluasi Kepribadian | Rp 200.000 |
| | 6. | Tes kepribadian sederhana | Rp 150.000 |
| | 7. | Tes kepribadian sedang | Rp 200.000 |
| | 8. | Tes kepribadian kompleks | Rp 250.000 |
| | 9. | Tes kecerdasan klasikal | Rp 30.000 |

| | | | |
|--|-----------|----------------------------------------------------|------------|
| | 10. | Tes kesiapan masuk SD | Rp 200.000 |
| | 11. | Psikoterapi sederhana | Rp 100.000 |
| | 12. | Psikoterapi Sedang | Rp 150.000 |
| | 13. | Psikoterapi kompleks | Rp 250.000 |
| | 14. | Konseling sederhana | Rp 100.000 |
| | 15. | Konseling sedang | Rp 125.000 |
| | 16. | Konseling kompleks | Rp 150.000 |
| | 17. | Psikoedukasi | Rp 100.000 |
| | 18. | Home visit | Rp 100.000 |
| | 19. | Visite ruangan | Rp 75.000 |
| | 20. | Wawancara | Rp 50.000 |
| | 21. | Observasi | Rp 50.000 |
| | 22. | Konsultasi psikologi | Rp 75.000 |
| | 23. | Surat sehat psikologi | Rp 150.000 |
| | 24. | Intervensi krisis | Rp 100.000 |
| | 25. | Seleksi, Promosi, Mutasi karyawan pelaksana | Rp 200.000 |
| | 26. | Seleksi, Promosi, Mutasi karyawan middle manajemen | Rp 300.000 |
| | 27. | Seleksi, Promosi, Mutasi Top manajemen | Rp 300.000 |
| | 28. | Perawatan Psikososial dan rehabilitasi | Rp 100.000 |
| | 29. | Tindakan sederhana | Rp 100.000 |
| | 30. | Tindakan sedang | Rp 150.000 |
| | 31. | Tindakan kompleks | Rp 200.000 |
| | 32. | Asesmen sederhana | Rp 150.000 |
| | 33. | Asesmen sedang | Rp 200.000 |
| | 34. | Asesmen kompleks | Rp 300.000 |
| | 35. | Hasil pemeriksaan psikologi | Rp 300.000 |
| | 36. | Tes potensi umum | Rp 300.000 |
| | 37. | Psikotes sederhana | Rp 150.000 |
| | 38. | Psikotes sedang | Rp 200.000 |
| | 39. | Psikotes kompleks | Rp 250.000 |
| | o. | Tindakan medik Instalasi Gawat Darurat : | |
| | 1. | Menjahit luka ukuran 1-5 cm | Rp 50.000 |
| | 2. | Menjahit luka ukuran 6-10 cm | Rp 80.000 |
| | 3. | Menjahit luka ukuran 11-15 cm | Rp 100.000 |
| | 4. | Menjahit luka ukuran > 16 cm | Rp 125.000 |
| | 5. | Menjahit otot/tendon | Rp 100.000 |
| | 6. | Insisi abses kecil | Rp 50.000 |
| | 7. | Insisi abses sedang | Rp 80.000 |
| | 8. | Insisi abses besar | Rp 125.000 |
| | 9. | Ekstirpasi korpus alineum | Rp 125.000 |
| | 10. | Ekstirpasi korpus alineum dengan penyulit | Rp 175.000 |
| | 11. | Penyuntikan ATS | Rp 20.000 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|---------|
| | 12. | Amputasi jari | Rp | 175.000 |
| | 13. | Supra pubic pungsi | Rp | 125.000 |
| | 14. | nedle Toraco sintetis | Rp | 150.000 |
| | 15. | Kumbah lambung | Rp | 50.000 |
| | 16. | Resusitasu jantung pulmoner | Rp | 175.000 |
| | 17. | EKG | Rp | 80.000 |
| | 18. | Suntion Pump/hari | Rp | 25.000 |
| | 19. | Extraxi luka/Roser palsty | Rp | 100.000 |
| | 20. | Necrotomy | Rp | 150.000 |
| | 21. | Buka Gips | Rp | 100.000 |
| | 22. | Eksplorasi luka | Rp | 65.000 |
| | 23. | Skunder hecting kecil | Rp | 35.000 |
| | 24. | Skunder hecting Sedang | Rp | 65.000 |
| | 25. | Skunder hecting Besar | Rp | 125.000 |
| | 26. | Spalak kecil | Rp | 25.000 |
| | 27. | Spalak besar | Rp | 50.000 |
| | 28. | Circumsisi | Rp | 300.000 |
| | <i>NB : Jika Pasien gawat darurat memerlukan observasi khusus/perawatan khusus lebih dari 2 jam maka dikenakan tarif one day care</i> | | | |
| p. | Pemeriksaan Kesehatan : | | | |
| | 1 | <i>Pemeriksaan Kesehatan untuk :</i> | | |
| | | a. Melamar Pekerjaan, mengambil SIM dan sebagainya | Rp | 25.000 |
| | | b. Tes Buta Warna | Rp | 25.000 |
| | 2 | <i>Pemeriksaan kesehatan sederhana (simple medical check up)</i> | | |
| | | a. Pemeriksaan Jasmani (dokter umum) | Rp | 35.000 |
| | | b. Pemeriksaan diagnotik : | | |
| | | '- Foto Rontgen Thorax | Rp | 125.000 |
| | | '- Laboratorium : | | |
| | | 1. Urin rutin | Rp | 40.000 |
| | | 2. Darah Rutin | Rp | 80.000 |
| | 3 | <i>Pemeriksaan kesehatan Dasar (basic medical check up)</i> | | |
| | | a. Pemeriksaan Jasmani (dokter Spesialis penyakit dalam) | Rp | 60.000 |
| | | b. Pemeriksaan diagnotik : | | |
| | | '- Foto Rontgen Thorax | Rp | 125.000 |
| | | '- Laboratorium : | | |
| | | 1. Urin rutin | Rp | 40.000 |
| | | 2. Darah Rutin | Rp | 80.000 |
| | | 3. Feaces Rutin | Rp | 40.000 |
| | | 4. Kimia Darah : | | |
| | | a. Gula darah | Rp | 35.000 |

| | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | b. Faal Hati | |
| | | '- SGPT | Rp 75.000 |
| | | '- SGOT | Rp 60.000 |
| | | c. Faal Ginjal | |
| | | '- Kreatinin | Rp 35.000 |
| | | '- Ureum | Rp 75.000 |
| | | d. Lemak | |
| | | '- HDL Kolesterol | Rp 45.000 |
| | | '- LDL Kolesterol | Rp 45.000 |
| | | '- Kolesterol | Rp 50.000 |
| | | '- Trigeserida | Rp 50.000 |
| | | 5. Serologi : HBsAg | Rp 75.000 |
| | | 6. Anti HBsAg | Rp 75.000 |
| | | <i>NB : Untuk tarif Elektrokardiografi jasa diterima oleh perawat, dokter</i> | |
| q. | Pemeriksaan Radiologi : | | |
| | 1 | USG : Semua Kelas (VIP, Utama, Kls I, Kls II, Kls III) | Rp 150.000 |
| | 2 | Floroscopy : Semua Kelas (VIP, Utama, Kls I, Kls II, Kls III) | Rp 800.000 |
| | 3 | a. CT Scan Non Kontras (Cranium) : | |
| | | - CT Scan kepala | Rp 1.250.000 |
| | | - CT Scan SPN | Rp 1.550.000 |
| | | - CT Scan Mastoid | Rp 1.550.000 |
| | | - CT Scan Maxila/Mandibula | Rp 1.350.000 |
| | | - CT Scan Orbita | Rp 1.350.000 |
| | | - CT Scan Larink/Leher/Thyroid | Rp 1.350.000 |
| | | - CT Scan Thorax | Rp 1.700.000 |
| | | - CT Scan Abdomen Non Kontras | Rp 1.850.000 |
| | | - CT Scan Pelvis Non Kontras | Rp 1.700.000 |
| | | - CT Scan Cervical Non Kontras | Rp 1.550.000 |
| | | - CT Scan Thoracalamumbal | Rp 1.850.000 |
| | | - CT Scan Extremitas Atas | Rp 1.850.000 |
| | | - CT Scan Extremitas Bawah | Rp 1.850.000 |
| | | b. CT Scan Kontras | |
| | | - CT Scan kepala CE | Rp 1.650.000 |
| | | - CT Scan SPN CE | Rp 2.100.000 |
| | | - CT Scan Mastoid | Rp 2.000.000 |
| | | - CT Scan Maxila/Mandibula CE | Rp 1.800.000 |
| | | - CT Scan Orbita CE | Rp 1.800.000 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | - CT Scan Larink/Leher /Thyroid CE | Rp 2.350.000 |
| | | - CT Scan Thorax CE | Rp 2.650.000 |
| | | - CT Scan Lumbal, Thorax CE | Rp 2.000.000 |
| | | - CT Scan ABD 3 Phase CE | Rp 2.000.000 |
| | | - CT Scan 3D Head | Rp 1.750.000 |
| | | - CT Scan 3D 3D Spine Cervical | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Spine Thorax | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Spine Lumbal | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Pelvis | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Exterimitas Atas | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Exterimitas Bawah | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Thorax | Rp 2.050.000 |
| | | - CT Scan 3D Thorax | Rp 2.050.000 |
| | 4 | Rontgen Konvensional 1 Posisi: Semua Kelas (VVIP, VIP, Utama, Kls I, Kls II, dan Kls III) | Rp 100.000 |
| r. | Pemeriksaan Instalasi Laboratorium : | | |
| | 1 | <i>Hematologi :</i> | |
| | | a. Darah rutin | Rp 80.000 |
| | | b. LED/BBS | Rp 30.000 |
| | | c. Golongan Darah | Rp 25.000 |
| | | d. Masa pembekuan | Rp 25.000 |
| | | e. Masa perdarahan | Rp 25.000 |
| | | f. APTT | Rp 110.000 |
| | | g. PPT | Rp 110.000 |
| | | h. Fibrinogen | Rp 130.000 |
| | | i. Evaluasi Morfologi hapusan darah tepi | Rp 150.000 |
| | | j. Sampling darah | Rp 30.000 |
| | | k. Preparasi sampel bahan PA | Rp 25.000 |
| | | l. Pemeriksaan Rafid test | Rp 150.000 |
| | 2 | <i>Kimia Klinik dan Urine :</i> | |
| | | a. Urine rutin dan sedimen | Rp 40.000 |
| | | b. Test kehamilan | Rp 25.000 |
| | | c. Protein total | Rp 40.000 |
| | | d. Kreatinin | Rp 35.000 |
| | | e. SGOT | Rp 60.000 |
| | | f. SGPT | Rp 75.000 |
| | | g. Glukosa | Rp 35.000 |
| | | h. Ureum | Rp 75.000 |
| | | i. Bilirubin direct | Rp 40.000 |

| | | | |
|---|------------------------------------------|----|---------|
| | j. Bilirubin indirect | Rp | 40.000 |
| | k. Bilirubin total | Rp | 45.000 |
| | l. Asam urat | Rp | 45.000 |
| | m. HDL Kolesterol | Rp | 45.000 |
| | n. LDL Kolesterol | Rp | 45.000 |
| | o. Triglisericid | Rp | 50.000 |
| | p. Kolesterol | Rp | 50.000 |
| | q. GGT | Rp | 50.000 |
| | r. Keton darah | Rp | 50.000 |
| | s. Analisis Gas darah | Rp | 250.000 |
| | t. Elektrolite | Rp | 250.000 |
| | u. Analisis cairan tubuh (pleura/asites) | Rp | 150.000 |
| | v. Albumin | Rp | 40.000 |
| | w. Globuline | Rp | 40.000 |
| 3 | <i>Immunologi dan Serologi :</i> | | |
| | a. Feses rutin | Rp | 40.000 |
| | b. Malaria | Rp | 35.000 |
| | c. BTA | Rp | 40.000 |
| | d. Widal test | Rp | 40.000 |
| | e. Anti HBsAg (HBsAb) | Rp | 75.000 |
| | f. HBsAg | Rp | 75.000 |
| | g. TPHA (Sifilis) | Rp | 60.000 |
| | h. RPR (Sifilis) | Rp | 40.000 |
| | i. Anti HCV | Rp | 60.000 |
| | j. HIV | Rp | 40.000 |
| | k. Jamur (mycology) | Rp | 40.000 |
| | l. Mikrobiologi (pewarnaan gram) | Rp | 40.000 |
| | m. Pemeriksaan Narkoba : | | |
| | '- <i>Methamphetamins (sabu-sabu)</i> | Rp | 45.000 |
| | '- <i>Amphetamin (Ecstasy)</i> | Rp | 45.000 |
| | '- <i>Kokain</i> | Rp | 45.000 |
| | '- <i>Benzodiazepine</i> | Rp | 45.000 |
| | '- <i>Morphine</i> | Rp | 45.000 |
| | '- <i>THC (Ganja)</i> | Rp | 45.000 |
| | n. Analisis cairan sperma | Rp | 100.000 |
| | o. TSH | Rp | 170.000 |
| | p. T3 | Rp | 170.000 |
| | q. T4 | Rp | 170.000 |
| | r. FT4 | Rp | 200.000 |
| | s. tPSA | Rp | 200.000 |
| | t. Igm Salmonella (Tubex) | Rp | 300.000 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | u. NS1 (Dengue) | Rp 300.000 |
| | | v. IgG dan IgM (dengue) | Rp 170.000 |
| | | w. HbA1c | Rp 200.000 |
| | | <i>NB : Cyto ditambah 25% dari nilai Tarif</i> | |
| s. | Tindakan medik Poliklinik Saraf/Poliklinik Jiwa/Poliklinik lainnya | | |
| | 1 | <i>Poliklinik Neurologi (Saraf) :</i> | |
| | | a. Pemeriksaan fungsi luhur (Neurobehaviour) | Rp 250.000 |
| | | b. Pemeriksaan Funduskopi (Neuroophthalmologi) | Rp 85.000 |
| | | c. Injeksi Intraartikular tanpa USG | Rp 250.000 |
| | | d. Injeksi Intraartikular dengan USG | Rp 300.000 |
| | | e. Trigger Point Injection / Injeksi soft tissue | Rp 150.000 |
| | | f. Dry Needling per regio sederhana | Rp 150.000 |
| | | g. Dry Needling per regio kompleks | Rp 200.000 |
| | | h. Lumbal Pungsi | Rp 375.000 |
| | | i. Pemeriksaan EEG | Rp 498.500 |
| | | j. Pemeriksaan Transcranial Doppler (TCD) | Rp 653.400 |
| | | k. NCV / EMG | Rp 500.000 |
| | 2 | <i>Poliklinik Jiwa :</i> | |
| | | a. Psikiatri Forensik I | Rp 300.000 |
| | | b. Psikiatri Forensik II | Rp 1.700.000 |
| | | c. Psikiatri Forensik III | Rp 1.800.000 |
| | | d. Psikiatri Forensik IV | Rp 2.000.000 |
| | | e. Pemeriksaan dan wawancara Psikiatri I | Rp 150.000 |
| | | f. Pemeriksaan dan wawancara Psikiatri II | Rp 200.000 |
| | | g. Pemeriksaan dan wawancara Psikiatri III | Rp 300.000 |
| | | h. Psikoterapi | Rp 200.000 |
| | | i. Injeksi Antipsikotik | Rp 25.000 |
| t. | Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) | | |
| | 1 | <i>Pengadaan Darah Transfusi :</i> | |
| | | a. Cross Match (uji silang serasi) | Rp 110.000 |
| | | b. Skrining penyakit infeksi (HIV, Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C) | Rp 235.000 |
| | | c. Kantong darah | Rp 120.000 |

| | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2 | <i>Tindakan lain :</i> | |
| | | a. Direct Coomb's (DCT) | Rp 80.000 |
| | | b. Phlebotomy terapetik | Rp 120.000 |
| | <i>NB : Cyto ditambah 25% dari nilai Tarif</i> | | |
| u. | Perawatan Jenazah/Visum : | | |
| | 1 | <i>Pelayanan Jenazah :</i> | |
| | | a. Kamar jenazah/hari | Rp 50.000 |
| | | b. Penyimpanan jenazah/hari | Rp 150.000 |
| | | c. Perawatan jenazah | Rp 200.000 |
| | | d. Pelayanan Konservasi jenazah : | |
| | | '- Tindakan + formalin | Rp 1.500.000 |
| | | '- Tindakan tanpa formalin | Rp 1.000.000 |
| | 2 | <i>Visum Et Repertum :</i> | |
| | | a. Visum luka korban hidup | Rp 75.000 |
| | | b. Visum luar (korban mati) di RS | Rp 200.000 |
| | | c. Visum luar (korban mati) di Luar RS | Rp 500.000 |
| | | d. Visum dalam (Otopsi) | Rp 2.500.000 |
| | <i>NB : Jika pelayanan konservasi jenazah dilakukan oleh perawat tanpa dokter maka jasa pelayanan kepada perawat</i> | | |
| 2 | RAWAT INAP : | | |
| | <i>Tindakan Medik di Instalasi/Tindakan lainnya :</i> | | Penambahan pelayanan yang merupakan rincian dan detail rincian objek tindakan medik di Instalasi/tindakan medik lainnya di atur dalam Peraturan Bupati |
| | a. | Tindakan Medik Instalasi Kamar Bersalin : | |
| | | 1 <i>Partus Normal (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 1.250.000 |
| | | b. Kls II | Rp 1.750.000 |
| | | c. Kls I | Rp 2.000.000 |
| | | d. Utama | Rp 2.250.000 |
| | | e. VIP | Rp 2.500.000 |
| | | f. VVIP | Rp 3.500.000 |
| | | 2 <i>Partus Patologis spontan (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 2.100.000 |
| | | b. Kls II | Rp 2.600.000 |
| | | c. Kls I | Rp 2.850.000 |
| | | d. Utama | Rp 3.100.000 |
| | | e. VIP | Rp 3.350.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.350.000 |

| | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 3 | <i>Partus Patologis tindakan Vacum (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | | a. Kls III | Rp 2.550.000 |
| | | | b. Kls II | Rp 3.050.000 |
| | | | c. Kls I | Rp 3.300.000 |
| | | | d. Utama | Rp 3.550.000 |
| | | | e. VIP | Rp 3.800.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.800.000 | |
| | | 4 | <i>Partus Patologis tindakan Forcep (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | | a. Kls III | Rp 2.550.000 |
| | | | b. Kls II | Rp 3.050.000 |
| | | | c. Kls I | Rp 3.300.000 |
| | | | d. Utama | Rp 3.550.000 |
| | | | e. VIP | Rp 3.800.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.800.000 | |
| | | 5 | <i>Partus Patologis tindakan Embriotomy (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | | a. Kls III | Rp 4.420.000 |
| | | | b. Kls II | Rp 4.920.000 |
| | | | c. Kls I | Rp 5.170.000 |
| | | | d. Utama | Rp 5.420.000 |
| | | | e. VIP | Rp 5.670.000 |
| | | f. VVIP | Rp 6.670.000 | |
| | | 6 | <i>Curretage Terapis/Diagnosis (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | | a. Kls III | Rp 2.550.000 |
| | | | b. Kls II | Rp 3.050.000 |
| c. Kls I | Rp 3.300.000 | | | |
| d. Utama | Rp 3.550.000 | | | |
| e. VIP | Rp 3.800.000 | | | |
| f. VVIP | Rp 4.800.000 | | | |
| 7 | <i>Curretage Abortus (Paket berdasarkan kelas) :</i> | | | |
| | a. Kls III | Rp 2.100.000 | | |
| | b. Kls II | Rp 2.600.000 | | |
| | c. Kls I | Rp 2.850.000 | | |
| | d. Utama | Rp 3.100.000 | | |
| | e. VIP | Rp 3.350.000 | | |
| f. VIP | Rp 4.350.000 | | | |
| 8 | <i>Curretage Mola Hidatidosa (Paket berdasarkan kelas) :</i> | | | |
| | a. Kls III | Rp 2.550.000 | | |
| | b. Kls II | Rp 3.050.000 | | |

| | | | |
|--|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | c. Kls I | Rp 3.300.000 |
| | | d. Utama | Rp 3.550.000 |
| | | e. VIP | Rp 3.800.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.800.000 |
| | 9 | <i>Insisi Abses Bartolini (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 2.100.000 |
| | | b. Kls II | Rp 2.600.000 |
| | | c. Kls I | Rp 2.850.000 |
| | | d. Utama | Rp 3.100.000 |
| | | e. VIP | Rp 3.350.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.350.000 |
| | 10 | <i>Calvratif Perenium (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 315.000 |
| | | b. Kls II | Rp 630.000 |
| | | c. Kls I | Rp 700.000 |
| | | d. Utama | Rp 775.000 |
| | | e. VIP | Rp 900.000 |
| | | f. VVIP | Rp 1.100.000 |
| | 11 | <i>Cervical Cerclage (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 315.000 |
| | | b. Kls II | Rp 630.000 |
| | | c. Kls I | Rp 700.000 |
| | | d. Utama | Rp 775.000 |
| | | e. VIP | Rp 900.000 |
| | | f. VVIP | Rp 1.100.000 |
| | 12 | <i>Kuldosintesis (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 315.000 |
| | | b. Kls II | Rp 630.000 |
| | | c. Kls I | Rp 700.000 |
| | | d. Utama | Rp 775.000 |
| | | e. VIP | Rp 900.000 |
| | | f. VVIP | Rp 1.100.000 |
| | 13 | <i>Manual + Placenta Partus Normal (Paket berdasarkan kelas) :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 2.100.000 |
| | | b. Kls II | Rp 2.600.000 |
| | | c. Kls I | Rp 2.850.000 |
| | | d. Utama | Rp 3.100.000 |

| | | | |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | e. VIP | Rp 3.350.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.350.000 |
| | NB : | <p>1. Jika pasien tidak dirawat maka tarif pasien disamakan dengan tarif pasien Kls I</p> <p>2. Jika pasien di kamar bersalin dirawat selama 1 hari maka asuhan keperawatannya mengikuti kelas kamar pasien</p> | |
| | b. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Kebidanan : | |
| | | 1 | <i>Calforative Perineum (Paket berdasarkan kelas) :</i> |
| | | a. Kls III | Rp 315.000 |
| | | b. Kls II | Rp 630.000 |
| | | c. Kls I | Rp 700.000 |
| | | d. Utama | Rp 775.000 |
| | | e. VIP | Rp 900.000 |
| | | f. VVIP | Rp 1.100.000 |
| | | 2 | <i>Marsupialisasi (Paket berdasarkan kelas) :</i> |
| | | a. Kls III | Rp 2.100.000 |
| | | b. Kls II | Rp 2.600.000 |
| | | c. Kls I | Rp 2.850.000 |
| | | d. Utama | Rp 3.100.000 |
| | | e. VIP | Rp 3.350.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.350.000 |
| | c. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Penyakit Anak : | |
| | | 1. | Suntikan Vaksin Rp 25.000 /tindakan |
| | | 2. | Lumbal pungsi Rp 200.000 /tindakan |
| | | 3. | Bone Marrow pungsi Rp 300.000 /tindakan |
| | | 4. | Kardio Pulmonar Resusitasi Rp 300.000 /tindakan |
| | | 5. | Resusitasi Rp 300.000 /tindakan |
| | | 6. | Pasang Infus Umbilikal Rp 240.000 /tindakan |
| | d. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Penyakit Dalam : | |
| | | 1. | Pungsi Pleura Rp 150.000 /tindakan |
| | | 2. | Pungsi Asites Rp 250.000 /tindakan |
| | | 3. | Pungsi Cairan Sendi Rp 185.000 /tindakan |
| | | 4. | Biopsi Jarum Halus Rp 260.000 /tindakan |
| | | 5. | Bone Marrow Pungsi Rp 300.000 /tindakan |
| | | 6. | Pleura Tap Therapeutik Rp 480.000 /tindakan |
| | | 7. | Pengambilan Cairan lambung Rp 260.000 /tindakan |
| | | 8. | Pericardial Tap Rp 115.000 /tindakan |
| | | 9. | Aspirasi Abses Pd Hepar Rp 485.000 /tindakan |
| | | 10. | Gastrokopi/Pengambilan benda asing Rp 600.000 /tindakan |
| | | 11. | Penyuntikan intra artikuler Rp 410.000 /tindakan |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----------|----------------|
| | 12. | Join Tap Therapeutik | Rp | 485.000 | /tindakan |
| | 13. | Pemeriksaan ECO | Rp | 300.000 | /tindakan |
| | 14. | Pemasangan WSD | Rp | 1.000.000 | /tindakan |
| | 15. | EKG | Rp | 80.000 | /tindakan |
| | 16. | Kardioversi | Rp | 390.000 | /tindakan |
| | 17. | Resusutasi | Rp | 300.000 | /tindakan |
| e. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Kebidanan : | | | | |
| | 1. | Skunder Hecting Kecil | Rp | 115.000 | /tindakan |
| | 2. | Skunder Hecting Sedang | Rp | 225.000 | /tindakan |
| | 3. | Skunder Hecting Besar | Rp | 300.000 | /tindakan |
| | 4. | Vulva Hygines/kali | Rp | 60.000 | /tindakan |
| f. | Tindakan ICU/NICU/PICU/ICCU/CVCU/HCU/Perinatologi : | | | | |
| | 1 | <i>ICU :</i> | | | |
| | | a. Syringe pump | Rp | 150.000 | /hari |
| | | b. Suction pump | Rp | 150.000 | /kali tindakan |
| | | c. DC syok | Rp | 300.000 | /kali tindakan |
| | | d. Inkubasi indotracheal | Rp | 150.000 | /kali tindakan |
| | | e. Pemasangan dan Penyambungan CVP | Rp | 50.000 | |
| | | f. Cardio pulmoner resusitasi (CPR) | Rp | 150.000 | |
| | | g. Monitoring EKG | Rp | 150.000 | /hari |
| | | h. Ventilator | Rp | 35.000 | /jam |
| | | i. Treadmil Stres | Rp | 25.000 | |
| | | j. Spooling lambung | Rp | 50.000 | /kali tindakan |
| | | k. Spooling kantong kencing | Rp | 50.000 | /kali tindakan |
| | | l. Inhalasi terapi | Rp | 25.000 | |
| | | m. Infusion pump | Rp | 150.000 | /hari |
| | | n. Pasang cabut arteri lima | Rp | 1.200.000 | /hari |
| | | o. Anti decubitus matras | Rp | 50.000 | /hari |
| | | p. Oksigen dewasa | Rp | 6.000 | /liter |
| | | q. Vulva/Penis hygiene | Rp | 50.000 | /kali tindakan |
| | | r. Oral Hygiene | Rp | 35.000 | /kali tindakan |
| | | s. Ganti balut gas < 5 lembar | Rp | 25.000 | /kali tindakan |
| | | t. Ganti balut gas 6 - 10 lembar | Rp | 35.000 | /kali tindakan |
| | | u. Ganti balut gas > 10 lembar | Rp | 45.000 | /kali tindakan |
| | | v. Memandikan pasien | Rp | 120.000 | /kali tindakan |
| | | w. EKG | Rp | 80.000 | /kali tindakan |
| | | x. Blanket riol | Rp | 50.000 | /kali tindakan |
| | | y. Pemakaian NIBP | Rp | 20.000 | /kali tindakan |
| | | z. Terapi Oksigen Non Invasive | Rp | 11.000 | /kali tindakan |
| | | aa. Terapi Oksigen Invasive (Ventilator) | Rp | 6.250.000 | /hari |
| | | bb. Tatalaksana Cardiac Arest 1 Siklus | Rp | 2.800.000 | /hari |
| | | cc. Tatalaksana Cardiac Arest 2 Siklus | Rp | 5.900.000 | /hari |
| | | dd. Tatalaksana syok/Hipovolemik | Rp | 5.700.000 | /hari |
| | | ee. Perawatan luka bakar luas | Rp | 300.000 | /kali tindakan |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| | | ff. Pasang/cabut arteri line | Rp 1.200.000 | /kali tindakan |
| | | gg. Pasang ETT ruang intensive | Rp 1.200.000 | /kali tindakan |
| | | hh. Inhalasi terapi ventilator | Rp 150.000 | /kali tindakan |
| | | ii. Gastric cooling | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | jj. Bladder training | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | kk. Gut feeding | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | ll. Pemberian nutrisi enteral | Rp 120.000 | /kali tindakan |
| | | mm. Pemberian nutrisi parenteral | Rp 1.000.000 | /hari |
| | | nn. Matras decubitus | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | oo. Pasang infus dengan penyulit | Rp 300.000 | /kali tindakan |
| | | pp. Pemasangan CVC | Rp 2.000.000 | /kali tindakan |
| | | qq. Mengukur tekanan cuff ETT | Rp 20.000 | /kali tindakan |
| | | rr. Layanan transportasi pasien dengan menggunakan ventilator dan monitor | Rp 100.000 | /jam |
| | | ss. Memandikan pasien dengan penyulit | Rp 120.000 | /kali tindakan |
| | | tt. Clapping/Chest fisioterapi dada | Rp 50.000 | /kali tindakan |
| | | uu. Perawatan Colostomy | Rp 150.000 | /kali tindakan |
| | | vv. Monitoring saturasi | Rp 30.000 | /jam |
| | | ww. CVC | Rp 1.500.000 | /kali tindakan |
| | | xx. Perawatan /pemasangan ETT | Rp 300.000 | /kali tindakan |
| | | yy. Extubasi | Rp 150.000 | /kali tindakan |
| | 2 | NICU : | | |
| | | a. Pasang Ventilator | Rp 35.000 | /jam |
| | | b. Pasang monitor | Rp 30.000 | /hari |
| | | c. Monitor memakai besite monitor | Rp 35.000 | /hari |
| | | d. Pasang syringe pump | Rp 100.000 | /hari |
| | | e. Pasang Infusion pump | Rp 100.000 | /hari |
| | | f. Echo | Rp 300.000 | /hari |
| | | g. Exstubasi | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | h. Resusitasi neonatus patologis | Rp 400.000 | /kali tindakan |
| | | i. Intubasi | Rp 300.000 | /kali tindakan |
| | | j. Personal hygiene/memandikan pasien | Rp 60.000 | /kali tindakan |
| | | k. Pasang infus neonatus | Rp 100.000 | /kali tindakan |
| | | l. Pasang infus umbilikal | Rp 125.000 | /kali tindakan |
| | | m. Buka umbilikal | Rp 25.000 | /kali tindakan |
| | | n. Perawatan infus/3 hari | Rp 50.000 | /kali tindakan |
| | | o. Pasang NGT/OGT | Rp 80.000 | /kali tindakan |
| | | p. Pemberian minum per NGT/OGT | Rp 15.000 | /kali tindakan |
| | | q. Monitoring saturasi | Rp 25.000 | /hari |

| | | | |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | r. Pasang Neo Puff/ T-Piece resusitator neonatus | Rp 200.000 /hari |
| | 3 | PERINATOLOGI : | |
| | | a. CPAP/hari | |
| | | '- Hari I Rp.125.000+BHP Rp.500.000 | Rp 625.000 /kali tindakan |
| | | '- Hari II dan seterusnya | Rp 125.000 /kali tindakan |
| | | b. Infus pump | Rp 35.000 /kali tindakan |
| | | c. Resusitasi bayi patologis | Rp 475.000 /kali tindakan |
| | | d. Perawatan infus/3 hari | Rp 35.000 /kali tindakan |
| | | e. Pemberian minum melalui OGT/NGT | Rp 35.000 /kali tindakan |
| | | f. Pasang OGT/NGT pada bayi | Rp 60.000 /kali tindakan |
| | | g. Pasang infus bayi | Rp 35.000 /kali tindakan |
| | | h. Personal hygiene/memandikan pasien | Rp 60.000 /kali tindakan |
| | | i. Perawatan tali pusat | Rp 30.000 /kali tindakan |
| | | j. Pasang Ligth Therapy/Blue Ligth Therapy | Rp 150.000 /hari |
| | | k. Infant Warner/hari | Rp 75.000 /hari |
| | | l. Pasang Puls Oximetri | Rp 35.000 /hari |
| | | m. Suction Pump | Rp 35.000 /kali tindakan |
| | g. | Tindakan medik Operasi/Kamar Operasi/Operasi Emergency/Operasi lainnya : | |
| | | ❖ Tindakan medis Operasi Mata terencana : | |
| | | 1. Ruptur Cornea | Rp 8.000.000 |
| | | 2. Ruptur sklera | Rp 8.000.000 |
| | | 3. Ruptur palpebra | Rp 4.000.000 |
| | | 4. Ruptur Canalis Lacrimalis | Rp 4.500.000 |
| | | 5. Phacoemulsifikasi dengan penyulit | Rp 7.500.000 |
| | | 6. ECCE dengan penyulit | Rp 6.000.000 |
| | | 7. Eviscerasi | Rp 6.500.000 |
| | | 8. Tumor palpebra | Rp 3.500.000 |
| | | 9. Tumor adneksa | Rp 4.000.000 |
| | | 10. Tumor kornea | Rp 4.500.000 |
| | | 11. Trabekulektomi dengan penyulit | Rp 7.000.000 |
| | | 12. Implant IOL sekunder | Rp 4.000.000 |
| | | 13. Reposisi Iris / IOL | Rp 4.000.000 |
| | | NB : Untuk operasi katarak belum termasuk biaya pembelian IOL | |
| | | ❖ Tindakan medis Operasi terencana : | |
| | | 1 Operasi Kecil : | |
| | | a. Kls III | Rp 2.500.000 |
| | | b. Kls II | Rp 3.000.000 |
| | | c. Kls I | Rp 3.250.000 |

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | d. Utama | Rp 3.500.000 |
| | | e. VIP | Rp 3.750.000 |
| | | f. VVIP | Rp 4.000.000 |
| | 2. | <i>Operasi Sedang :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 7.500.000 |
| | | b. Kls II | Rp 10.250.000 |
| | | c. Kls I | Rp 10.500.000 |
| | | d. Utama | Rp 10.750.000 |
| | | e. VIP | Rp 11.000.000 |
| | | f. VVIP | Rp 12.000.000 |
| | 3 | <i>Operasi Besar :</i> | |
| | | a. Kls III | Rp 10.000.000 |
| | | b. Kls II | Rp 11.850.000 |
| | | c. Kls I | Rp 12.100.000 |
| | | d. Utama | Rp 12.350.000 |
| | | e. VIP | Rp 12.600.000 |
| | | f. VVIP | Rp 13.600.000 |
| | <p><i>NB :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Jasa dokter spesialis anestesi diambil dari jasa dokter operator sebesar 30%.</i> 2. <i>Jasa Perawat OK + Penata Anestesi dibagi menjadi 60% perawat OK dan 40% penata Anestesi.</i> 3. <i>Jika operasi dilaksanakan tanpa dokter anestesi maka jasa dokter spesialis anestesi dibagi menjadi 75% penata anestesi, 25% bersama.</i> 4. <i>Jika operasi dilaksanakan tanpa dokter anestesi dan penata anestesi maka jasa dokter spesialis anestesi dan penata anestesi dibagi menjadi 37,5% dokter operator, 37,5% perawat OK, 25% bersama.</i> 5. <i>Cyto ditambah 25% dari nilai tarif</i> 6. <i>Paket Operasi :</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Operasi kecil 1 hari rawatan</i> - <i>Operasi sedang 3 hari rawatan</i> - <i>Operasi besar 7 hari rawatan</i> - <i>Jika melebihi ketentuan di atas maka pasien dikenakan tarif kamar per hari</i> | | |
| | h. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Haemodialisis : | |
| | | 1. Tindakan Haemodialisis | Rp 900.000 /tindakan |
| | i. | Tindakan medik Instalasi Rawat Inap Bedah : | |
| | | 1. Menjahit luka ukuran 1-5 cm | Rp 50.000 /tindakan |
| | | 2. Menjahit luka ukuran 6-10 cm | Rp 80.000 /tindakan |
| | | 3. Menjahit luka ukuran 11-15 cm | Rp 100.000 /tindakan |
| | | 4. Menjahit luka ukuran > 16 cm | Rp 125.000 /tindakan |
| | | 5. Luka bakar < 10% + perawatan/kali | Rp 75.000 /tindakan |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|---------|-----------|
| | 6. | Luka bakar 10% - 50% + perawatan/kali | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 7. | Luka bakar > 10% + perawatan/kali | Rp | 200.000 | /tindakan |
| | 8. | Insisi abses kecil | Rp | 80.000 | /tindakan |
| | 9. | Insisi abses sedang | Rp | 125.000 | /tindakan |
| | 10. | Insisi abses besar | Rp | 125.000 | /tindakan |
| | 11. | Ekstarksi kuku/Roserplasty | Rp | 100.000 | /tindakan |
| | 12. | Explorasi luka/kali | Rp | 125.000 | /tindakan |
| | 13. | Buka Gips | Rp | 100.000 | /tindakan |
| | 14. | Nekrotomi/kali | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 15. | Angkat Corpus Alineum | Rp | 125.000 | /tindakan |
| j. | Tindakan medik lainnya/ Keperawatan/ Kebidanan : | | | | |
| | 1. | Blue light terapy/hari | Rp | 160.000 | /tindakan |
| | 2. | Couvise/hari | Rp | 160.000 | /tindakan |
| | 3. | Suction pump/kali | Rp | 50.000 | /tindakan |
| | 4. | Vena Section | Rp | 300.000 | /tindakan |
| | 5. | Pasang NGT | Rp | 100.000 | /tindakan |
| | 6. | Sonde | Rp | 60.000 | /hari |
| | 7. | Pasang kateterisasi | Rp | 100.000 | /tindakan |
| | 8. | Pasang infus | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 9. | Ganti perban kecil,gaas < 5 lembar | Rp | 37.500 | /tindakan |
| | 10. | Ganti perban sedang,gaas 6-10 lembar | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 11. | Ganti perban besar,gaas > 10 lembar | Rp | 85.000 | /tindakan |
| | 12. | Memandikan pasien | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 13. | Oral Hygiene/kali | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 14. | Venis/Vulva hygiene/kali | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 15. | Clisma/kali | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 16. | Spooling kantung kencing/kali | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 17. | Nebulizer | Rp | 125.000 | /tindakan |
| | 18. | Buka < 10 jahitan (kecil) | Rp | 25.000 | /tindakan |
| | 19. | Buka > 10 jahitan (besar) | Rp | 50.000 | /tindakan |
| | 20. | Perawatan luka gangren kecil | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 21. | Perawatan luka Gangren besar | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 22. | Supra Pubic Puntie | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 23. | Pasang gips kecil | Rp | 150.000 | /tindakan |
| | 24. | Pasang gips sedang | Rp | 200.000 | /tindakan |
| | 25. | Pasang Gips Besar | Rp | 250.000 | /tindakan |
| | 26. | Kumbah lambung | Rp | 50.000 | /tindakan |
| | 27. | Injeksi HB19 | Rp | 25.000 | /tindakan |
| | 28. | Injeksi | Rp | 15.000 | /hari |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | 29. | Spooling drain | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 30. | Spooling NGT | Rp | 60.000 | /tindakan |
| | 31. | Doppler/CGT/Shift | Rp | 35.000 | /tindakan |
| 3 | KAMAR : | | | | |
| | a. | VVIP | Rp | 400.000 | |
| | b. | VIP | Rp | 250.000 | |
| | c. | ICU/NICU/CVCU | Rp | 350.000 | |
| | d. | Kelas Utama | Rp | 200.000 | |
| | e. | Kelas I | Rp | 150.000 | |
| | f. | Kelas II | Rp | 100.000 | |
| | g. | Kelas III | Rp | 50.000 | |
| | <p>NB : 1. Untuk IGD disamakan dengan kelas II</p> <p>2. Untuk Perinatologi disamakan dengan VIP</p> <p>3. Untuk Ruangan isolasi disamakan dengan Kelas Utama</p> <p>4. Untuk Ruang Recovery Room disamakan dengan Kelas Utama</p> | | | | |
| 4 | MAKAN MINUM PASIEN : | | | | |
| | a. | <i>VVIP :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 20.000 | |
| | | - Snack Pagi | Rp | 10.000 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 35.000 | |
| | | - Snack Sore | Rp | 10.000 | |
| | | - Makan Sore | Rp | 30.000 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 4.000 | |
| | | - Total : | Rp | 109.000 | |
| | b. | <i>VIP :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 10.000 | |
| | | - Snack Pagi | Rp | 5.000 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 17.500 | |
| | | - Snack Sore | Rp | 5.000 | |
| | | - Makan Sore | Rp | 15.000 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 2.000 | |
| | | - Total : | Rp | 54.500 | |
| | c. | <i>Utama :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 10.000 | |
| | | - Snack Pagi | Rp | 5.000 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 17.500 | |
| | | - Snack Sore | Rp | 2.500 | |
| | | - Makan Sore | Rp | 15.000 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 2.000 | |
| | | - Total : | Rp | 52.000 | |
| | d. | <i>Kls I :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 10.000 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| | | - Snack Pagi | Rp | 3.500 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 15.000 | |
| | | - Snack Sore | Rp | 2.500 | |
| | | - Makan Sore | Rp | 12.500 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 1.500 | |
| | | - Total : | Rp | 45.000 | |
| | e. | <i>Kls II :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 10.000 | |
| | | - Snack Pagi | Rp | 3.500 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 12.500 | |
| | | - Snack Sore | | | |
| | | - Makan Sore | Rp | 12.500 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 1.500 | |
| | | - Total : | Rp | 40.000 | |
| | f. | <i>Kls III :</i> | | | |
| | | - Makan Pagi | Rp | 10.000 | |
| | | - Snack Pagi | Rp | 3.500 | |
| | | - Makan Siang | Rp | 10.000 | |
| | | - Snack Sore | | | |
| | | - Makan Sore | Rp | 10.000 | |
| | | - Air Mineral (3 Gelas) | Rp | 1.000 | |
| | | - Total : | Rp | 34.500 | |
| | <p>NB : 1. VVIP, VIP, Utama dan Kls I : 3 kali makan utama dan 2 kali snack 2. Kls II dan III : 3 kali makan utama dan 1 kali snack 3. Untuk ICU dan Perinatologi disamakan dengan ruangan VIP 4. Untuk One Day Care disamakan dengan Kelas II</p> | | | | |
| 5 | TARIF UMUM : | | | | |
| | a. | <i>Pemakaian Aula :</i> | | | |
| | | - Instansi Pemerintah | Rp | 500.000 | |
| | | - Swasta | Rp | 1.000.000 | |
| | b. | <i>Penelitian Mahasiswa Universitas luar Merangin :</i> | | | |
| | | - Permintaan data awal | Rp | 200.000 | |
| | | - Permintaan data penelitian | Rp | 300.000 | |
| | c. | <i>Surat Keterangan Kesehatan lengkap/ dirawat</i> | Rp | 25.000 | |
| | d. | <i>Surat Keterangan untuk nasabah asuransi Jasa Raharja</i> | Rp | 150.000 | |
| | e. | <i>Tarif Sewa Lokasi untuk ATM</i> | (Sesuai MoU) | | dengan catatan bila diperlukan ada revisi untuk tahun berikutnya |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | f. | <i>Tarif Sewa ruangan</i> | (Sesuai MoU) | dengan catatan bila diperlukan ada revisi untuk tahun berikutnya |
| | g. | <i>Tarif kunjungan Study banding :</i> | | |
| | | - 1-5 orang | Rp 500.000 | |
| | | - 5-10 orang | Rp 750.000 | |
| | | - 10-20 orang | Rp 1.000.000 | |
| | | - Lebih dari 20 orang | Rp 1.500.000 | |
| | | - Jika lebih dari 1(satu) hari ditambah | Rp 50.000 | /hari/orang |
| | h. | <i>Tarif Uji Kredensial</i> | Rp 250.000 | /orang (tidak termasuk transportasi dan akomodasi) |
| | i. | <i>Mahasiswa magang/praktek (Umumdan ASN) :</i> | | |
| | | - Strata I | Rp 15.000 | / hari |
| | | - Mahasiswa D-III | Rp 10.000 | / hari |
| | | - Sekolah Menengah Kejuruan | Rp 7.500 | / hari |
| | j. | <i>Oksigen sentral</i> | Rp 6.000 | /liter |
| | k. | <i>N2O</i> | Rp 250.000 | /liter |
| 6 | TARIF KARCIS RAWAT JALAN, PENGUJIAN KESEHATAN DAN IGD : | | | |
| | a. | <i>Karcis Pengujian Kesehatan :</i> | | |
| | | - Umum | Rp 25.000 | |
| | | - Pelajar | Rp 10.000 | |
| | | - PNS | Rp 25.000 | |
| | b. | <i>Kunjungan Gawat Darurat</i> | Rp 20.000 | |
| | c. | <i>Home Care :</i> | | |
| | | - Dokter Spesialis | Rp 120.000 | |
| | | - Dokter | Rp 100.000 | |
| | | - Perawat/Bidan | Rp 50.000 | |
| | | - Ambulance | mengikuti tarif layanan Ambulance | |
| | d. | <i>Administrasi Visum Et Repertum</i> | Rp 50.000 | |
| | e. | <i>One Day Care</i> | | |
| NB : <i>Tarif One Day Care adalah Jasa Akomodasi dan Jasa Pelayanan</i> | | | | |
| 7 | TARIF KONSULTASI/VISITE/ASUHAN KEPERAWATAN/ASUHAN KEBIDANAN/KONSULTASI GIZI | | | |
| | a. | Dokter Spesialis | Rp 75.000 | |
| | b. | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 35.000 | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| | c. | Asuhan Keperawatan rawat inap dan IGD: | | |
| | | - Minimal Care | Rp 60.000 /hari | |
| | | - Partial care | Rp 100.000 /hari | |
| | | - Total/Intensive Care | Rp 150.000 /hari | |
| | d. | Askep Rawat Jalan (Poli) | Rp 25.000 | |
| | e. | Konsultasi Gizi | Rp 15.000 | |
| | f. | Konsultasi Kefarmasian | Rp 25.000 | |
| <p>NB : 1. Tarif Konsultasi/ Visite diambil setiap konsultasi/ visite 2. Tarif di Kelas VVIP, VIP, ICU/NICU/PICU/ICCU/CVCU/HCU/PRT, Utama, I, II dan III tidak termasuk obat-obatan</p> | | | | |
| 8 | TARIF LAYANAN AMBULANCE RUMAH SAKIT (Jarak Tempuh (PP) x Rp) | | | |
| | a. | <i>Luar Kota Bangko dalam Kabupaten Merangin :</i> | | |
| | | 1 | Kungkai | 16 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.112.000,- |
| | | 2 | Pulau Rengas | 28 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.196.000,- |
| | | 3 | Biuku Tanjung | 28 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.196.000,- |
| | | 4 | Bedeng Rejo | 48 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.336.000,- |
| | | 5 | Tambang Besi | 16 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.112.000,- |
| | | 6 | Titian Teras | 20 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.140.000,- |
| | | 7 | Lubuk Gaung | 30 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.210.000,- |
| | | 8 | Rantau Alai | 40 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.280.000,- |
| | | 9 | Pulau Layang | 50 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.350.000,- |
| | | 10 | Nalo | 90 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.630.000,- |
| | | 11 | Sungai Ulak | 14 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp. 98.000,- |
| | | 12 | Mentawak | 20 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.140.000,- |
| | | 13 | Aur Duri | 32 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.224.000,- |
| | | 14 | Desa Danau | 40 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.280.000,- |
| | | 15 | Desa Telun | 50 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.350.000,- |
| | | 16 | Talangkawo | 26 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.182.000,- |
| | | 17 | Dusun Mudo | 16 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.112.000,- |
| | | 18 | Tanjung Lamin | 30 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.210.000,- |
| | | 19 | Limbur Merangin | 40 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.280.000,- |
| | | 20 | Trans B1 | 48 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.336.000,- |
| | | 21 | Trans B2 | 60 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.420.000,- |
| | | 22 | Trans B3 | 60 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.420.000,- |
| | | 23 | Trans B4 | 50 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.350.000,- |
| | | 24 | Trans B5 | 50 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.350.000,- |
| | | 25 | Trans A1 | 60 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.420.000,- |
| 26 | Trans A2 | 60 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.420.000,- | | |

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 27 | Trans A3 | 80 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.560.000,- |
| 28 | Trans A4 | 60 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.420.000,- |
| 29 | Trans C1 | 80 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.560.000,- |
| 30 | Trans C2 | 40 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.280.000,- |
| 31 | Trans E1 | 70 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.490.000,- |
| 32 | Trans E2 | 70 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.490.000,- |
| 33 | Sungai Manau | 130 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.650.000,- |
| 34 | Muara Siau | 120 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.600.000,- |
| 35 | Muara Madras | 190 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.950.000,- |
| 36 | Rantau Panjang | 70 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.490.000,- |
| 37 | Muara Jernih | 80 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.560.000,- |
| 38 | Pamenang | 65 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.455.000,- |
| 39 | Hitam Ulu SPE | 80 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.560.000,- |
| 40 | Hitam Ulu SPD | 90 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.630.000,- |
| 41 | Hitam Ulu SPC | 98 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.686.000,- |
| 42 | Hitam Ulu SPA | 130 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.650.000,- |
| 43 | Hitam Ulu SPB | 145 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.725.000,- |
| 44 | Hitam Ulu SPH | 150 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.750.000,- |
| 45 | Hitam Ulu SPF | 160 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.800.000,- |
| 46 | Hitam Ulu SPI | 165 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.825.000,- |
| 47 | Paku Aji Bukit 12 | 175 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.875.000,- |
| 48 | Tanjung Putus | 95 KM/PP x Rp. 7.000 = Rp.665.000,- |
| 49 | Tanah Garo SPE | 180 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.900.000,- |
| 50 | Tanah Garo SPD | 190 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.950.000,- |
| 51 | Tanah Garo SPC | 200 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.1.000.000,- |
| 52 | Tanah Garo SPB | 220 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.1.100.000,- |
| 53 | Tanah Garo SPA | 260 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.1.300.000,- |
| 54 | Pulau Terbakar | 200 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.1.000.000,- |
| 55 | Kibul | 120 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.600.000,- |
| 56 | Telentam | 135 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.675.000,- |
| 57 | Dusun Tuo | 140 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.700.000,- |
| 58 | Masurai | 170 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.850.000,- |
| NB : | <p>1. Dalam Kota radius 5 (lima) KM Rp.200.000,-</p> <p>2. Untuk luar kota Rp.200.000,- ditambah tarif per KM jarak tempuh (Pulang-Pergi)</p> <p>3. Untuk Desa yang tidak tercantum dalam tarif di atas, mengikuti Desa terdekat yang tercantum dalam tabel di atas</p> | |
| b. | Luar Kabupaten Merangin dalam Provinsi Jambi : | |
| 1 | Sarolangun | 150 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp. 810.000,- |
| 2 | Pelawan | 200 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.080.000,- |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| | 3 | Singkut | 200 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.080.000,- |
| | 4 | Pulau Pandan | 220 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.188.000,- |
| | 5 | Pekan Gedang | 300 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.620.000,- |
| | 6 | Pauh | 220 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.188.000,- |
| | 7 | Mandiingin | 300 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.620.000,- |
| | 8 | Muara Bungo | 160 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp. 864.000,- |
| | 9 | Muara Tebo | 270 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.458.000,- |
| | 10 | Muara Tembesi | 370 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.998.000,- |
| | 11 | Muara Bulian | 460 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.2.484.000,- |
| | 12 | Muara Sabak | 960 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.4.800.000,- |
| | 13 | Sengeti | 650 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.3.500.000,- |
| | 14 | Jambi | 560 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.3.000.000,- |
| | 15 | Sungai Penuh | 330 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.1.782.000,- |
| | 16 | Kuala Tungkal | 710 KM/PP x Rp. 5.400 = Rp.3.800.000,- |
| c. | <i>Luar Kabupaten Merangin Luar Provinsi Jambi :</i> | | |
| | 1 | Solok | 620 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.100.000,- |
| | 2 | Padang | 740 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.700.000,- |
| | 3 | Pariaman | 830 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.4.150.000,- |
| | 4 | Bukittinggi | 770 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.850.000,- |
| | 5 | Padang Panjang | 730 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.650.000,- |
| | 6 | Batu Sangkar | 780 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.900.000,- |
| | 7 | Payakumbuh | 830 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.4.150.000,- |
| | 8 | Pasaman | 950 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.4.750.000,- |
| | 9 | Painan | 750 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.3.750.000,- |
| | 10 | Padang Sidempuan | 1400 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.6.300.000,- |
| | 11 | Sibolga | 1580 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.7.110.000,- |
| | 12 | Tarutung | 1640 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.7.380.000,- |
| | 13 | Balige | 1720 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.7.740.000,- |
| | 14 | Pematang Siantar | 1960 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.8.820.000,- |
| | 15 | Kisaran | 2800 KM/PP x Rp. 5.500 = Rp.15.400.000,- |
| | 16 | Tebing Tinggi | 2060 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.9.270.000,- |
| | 17 | Medan | 2230 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.10.035.000,- |
| | 18 | Berastagi | 2410 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.10.845.000,- |
| | 19 | Banda Aceh | 3530 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.15.885.000,- |
| | 20 | Pekanbaru | 1040 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.4.680.000,- |
| | 21 | Palembang | 1160 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.5.220.000,- |
| | 22 | Lubuk Linggau | 590 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.2.950.000,- |
| | 23 | Bengkulu | 860 KM/PP x Rp. 5.000 = Rp.4.300.000,- |
| | 24 | Manna | 1060 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.4.770.000,- |

| | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 25 | Tanjung Karang | 2280 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.10.260.000,- |
| 26 | Jakarta | 2560 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.11.520.000,- |
| 27 | Bandung | 2900 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.13.050.000,- |
| 28 | Yogyakarta | 3750 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.16.875.000,- |
| 29 | Semarang | 3650 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.16.425.000,- |
| 30 | Pati | 3830 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.17.235.000,- |
| 31 | Surabaya | 4500 KM/PP x Rp. 4.500 = Rp.20.250.000,- |
| NB : | <p>1. Apabila tidak sampai ketujuan maka tarif disesuaikan dengan jarak tempuh</p> <p>2. Keterangan Tarif Jarak Tempuh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 /sd 100 KM x Rp.7.000/KM/PP - 100 /sd 500 KM x Rp.5.000/KM/PP - 500 /sd 1000 KM x Rp.5.000/KM/PP - Di atas 1000 KM x Rp.4.500/KM/PP - Daerah sulit dilalui dan atau memakai mobil Double gardan x Rp.10.500/KM/PP <p>3. Pengecuali :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan di atas 1000 KM/PP ditambah 15% di luar tarif untuk honor sopir 2 (dua) - Untuk daerah yang dilalui jalan tol dan penyeberangan ditambah 12% di luar tarif - Untuk pasien yang didampingi oleh dokter umum ditambah 60% di luar tarif - Untuk pasien yang didampingi oleh 2 perawat/bidan ditambah 30% di luar tarif | |

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

| Struktur | | Tarif |
|----------|--------------------------|-------------------|
| 1. | Rumah Tangga | Rp 5.000 /bulan |
| 2. | Asrama : | |
| | a. menampung > 100 orang | Rp 100.000 /bulan |
| | b. menampung < 100 orang | Rp 75.000 /bulan |
| 3. | Kos Kosan : | |
| | a. < 5 pintu | Rp 75.000 /bulan |
| | b. >5 s/d 10 pintu | Rp 100.000 /bulan |
| | c. > 10 pintu | Rp 150.000 /bulan |
| 4. | Hotel: | |
| | a. Bintang lima | Rp 500.000 /bulan |
| | b. Bintang empat | Rp 400.000 /bulan |
| | c. Bintang tiga | Rp 300.000 /bulan |
| | d. Bintang dua | Rp 250.000 /bulan |
| | e. Bintang satu | Rp 200.000 /bulan |
| | f. Melati tiga | Rp 200.000 /bulan |

| | | |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| | g. Melati dua | Rp 150.000 /bulan |
| | h. Melati satu | Rp 100.000 /bulan |
| 5. | Rumah Makan/Restoran: | |
| | a. Restoran | Rp 100.000 /bulan |
| | b. Rumah Makan | Rp 80.000 /bulan |
| | c. Warung Nasi/Kopi dan sejenisnya | Rp 60.000 /bulan |
| 6. | Fasilitas Kesehatan : | |
| | a. Rumah Sakit | Rp 250.000 /bulan |
| | b. Apotik | Rp 80.000 /bulan |
| | c. Puskesmas/Balai Pengobatan | Rp 80.000 /bulan |
| | d. Rumah bersalin | Rp 80.000 /bulan |
| | e. Toko Obat | Rp 60.000 /bulan |
| | f. Tempat Praktek Dokter : | |
| | - Umum/gigi | Rp 60.000 /bulan |
| | - Spesialis | Rp 80.000 /bulan |
| | - Klinik rawat Inap | Rp 100.000 /bulan |
| 7. | Industri Pabrik : | |
| | a. Besar (Grup,Persekutuan) | Rp 250.000 /bulan |
| | b. Menengah (Perseorangan) | Rp 150.000 /bulan |
| | c. Kecil (Industri RT, UMKM) | Rp 100.000 /bulan |
| 8. | Gudang : | |
| | a. Di atas 100 M2 | Rp 150.000 /bulan |
| | b. 50 s.d 100 M2 | Rp 100.000 /bulan |
| | c. 0 s.d 50 M2 | Rp 50.000 /bulan |
| 9. | Bioskop : | |
| | a. Golongan A | Rp 100.000 /bulan |
| | b. Golongan B | Rp 80.000 /bulan |
| | c. Golongan C dan D | Rp 70.000 /bulan |
| 10. | Perkantoran : | |
| | a. Perbankan | Rp 150.000 /bulan |
| | b. Non Perbankan (CV, PT, Firma dan sejenisnya) | Rp 80.000 /bulan |
| | c. Notaris | Rp 75.000 /bulan |
| | d. LBH | Rp 75.000 /bulan |
| | e. BUMN / BUMD | Rp 150.000 /bulan |
| 11. | Perdagangan/Pertokoan berdasarkan luas lokasi usaha : | |
| | a. Di atas 250 M2 | Rp 100.000 /bulan |
| | b. 150 s.d 250 M2 | Rp 90.000 /bulan |
| | c. 75 s.d 150 M2 | Rp 80.000 /bulan |
| | d. 30 s.d 75 M2 | Rp 70.000 /bulan |
| | e. 0 s.d 30 M2 | Rp 60.000 /bulan |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|
| 12. | Tempat Hiburan/Wisata | Rp | 100.000 | /bulan |
| 13. | Kios/Los/Petak Penjualan | Rp | 60.000 | /bulan |
| 14. | Pedagang Kaki Lima (PKL) | Rp | 2.000 | /hari |
| 15. | Bengkel/Tempat Cuci Kendaraan/Laundry Berdasarkan luas lokasi usaha : | | | |
| | a. Di atas 250 M2 | Rp | 100.000 | /bulan |
| | b. 150 s.d 250 M2 | Rp | 90.000 | /bulan |
| | c. 75 s.d 150 M2 | Rp | 80.000 | /bulan |
| | d. 30 s.d 75 M2 | Rp | 70.000 | /bulan |
| | e. 0 s.d 30 M2 | Rp | 60.000 | /bulan |
| 16. | Lembaga Pendidikan | | | |
| | a. Pemerintah : | | | |
| | - Perguruan Tinggi | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - SMU/SLTP sederajat | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - SD sederajat | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - PAUD/TK | Rp | 50.000 | /bulan |
| | b. Swasta : | | | |
| | - Perguruan Tinggi | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - SMU/SLTP sederajat | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - SD sederajat | Rp | 100.000 | /bulan |
| | - PAUD/TK | Rp | 50.000 | /bulan |
| | c. Pendidikan luar sekolah/Kursus | Rp | 50.000 | /bulan |
| 17. | Toko serba ada : | | | |
| | a. Mini market | Rp | 150.000 | /bulan |
| | b. Super market | Rp | 20.000 | /bulan |
| | c. Hypermart | Rp | 300.000 | /bulan |
| 18. | Gedung pertemuan | Rp | 100.000 | /kegiatan |
| 19. | Sarana Olahraga : | | | |
| | a. Pemerintah GOR/Koni : | | | |
| | • Gor : | | | |
| | - 1 s/d 3 hari | Rp | 350.000 | /bulan |
| | - 4 s/d 5 hari | Rp | 450.000 | /bulan |
| | - 7 s/d 10 hari | Rp | 550.000 | /bulan |
| | - 11 s/d 20 hari | Rp | 650.000 | /bulan |
| | - 21 s/d 30 hari | Rp | 700.000 | /bulan |
| | - diatas 30 hari | Rp | 800.000 | /bulan |
| | • Hall Bulutangkus/Futsal/Tenis | Rp | 100.000 | /bulan |

| | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | b. Swasta : | |
| | - Hall Bulutangkis/Futsal/Tenis | Rp 100.000 /bulan |
| 20. | Tempat Hiburan : | |
| | a. Tempat Hiburan tertutup : | |
| | - 1 s/d 3 hari | Rp 150.000 /bulan |
| | - 4 s/d 5 hari | Rp 200.000 /bulan |
| | - 7 s/d 10 hari | Rp 250.000 /bulan |
| | - 11 s/d 20 hari | Rp 350.000 /bulan |
| | - 21 s/d 30 hari | Rp 550.000 /bulan |
| | - diatas 30 hari | Rp 700.000 /bulan |
| | b. Tempat Hiburan terbuka : | |
| | - 1 s/d 3 hari | Rp 350.000 /bulan |
| | - 4 s/d 5 hari | Rp 450.000 /bulan |
| | - 7 s/d 10 hari | Rp 550.000 /bulan |
| | - 11 s/d 20 hari | Rp 650.000 /bulan |
| | - 21 s/d 30 hari | Rp 750.000 /bulan |
| | - diatas 30 hari | Rp 850.000 /bulan |
| 21 | Lain-lain : | |
| | a. lapangan perusahaan pertukangan. Pengeringan pelonohan bahan bahan | Rp 1.000.000 /bulan |
| | b. Pengeringan, pengelolaan, penjualan bahan baku industri dan hasil perkebunan | Rp 100.000 /bulan |
| | c. Aktifitas usaha informal (pasar Beduk) | Rp 4.000 /hari/lapak |
| | d. Bazar | Rp 4.000 /hari/lapak |
| | e. Showroom : | |
| | • Kendaraan Roda 4/lebih | |
| | - Di atas 250 M2 | Rp 150.000 /bulan |
| | - 150 s.d 250 M2 | Rp 100.000 /bulan |
| | - 75 s.d 150 M2 | Rp 75.000 /bulan |
| | • Kendaraan Roda 2/3 | |
| | - Di atas 250 M2 | Rp 150.000 /bulan |
| | - 150 s.d 250 M2 | Rp 100.000 /bulan |
| | - 75 s.d 150 M2 | Rp 75.000 /bulan |
| | f. Penggunaan sendiri TPA oleh Pribadi atau Badan : | |
| | - 0 s/d 4 ton | Rp 25.000 |
| | - Lebih 4 ton | Rp 50.000 |
| | g. Pembuangan Limbah Tinja | |
| | - Non Komersil | Rp 150.000 / 1 x buang |
| | - Komersil | Rp 300.000 / 1 x buang |

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| Struktur | | Tarif |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | a. Kendaraan Roda Dua | Rp 2.000 /unit per 1 x parkir |
| | b. Kendaraan Roda empat | Rp 3.000 /unit per 1 x parkir |
| | c. Kendaraan Roda enam | Rp 4.000 /unit per 1 x parkir |

4. PELAYANAN PASAR

| Struktur | | Tarif |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | Pasar Bawah Bangko : | |
| | a. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen) : | |
| | - Bawah bagian depan | Rp 800 /M2 per hari |
| | -Bawah bagian belakang | Rp 750 /M2 per hari |
| | - Bagian Atas | Rp 500 /M2 per hari |
| | - Bagian atas (los terbuka) | Rp 400 /M2 per hari |
| | - Kios pasar lereng non permanen | Rp 500 /M2 per hari |
| | b. Pasar Simp. IV Permanen : | |
| | Bagian atas (Lantai 2) | Rp 800 /M2 per hari |
| | Bawah bagian belakang | Rp 1.800 /M2 per hari |
| | Bawah bagian depan | Rp 2.350 /M2 per hari |
| | Bagian atas (lantai 3) | Rp 8.000.000 /tahun |
| | c. Pasar Masumai (permanen) | Rp 1.200 /M2 per hari |
| | d. Pasar Ex terbakar bangko : | |
| | - Blok A | Rp 1.500 /M2 per hari |
| | - Blok B | Rp 1.400 /M2 per hari |
| | - Blok C bagian atas | Rp 800 /M2 per hari |
| | - Blok C bagian bawah | Rp 1.500 /M2 per hari |
| | - Blok D | Rp 1.500 /M2 per hari |
| | e. Pedagang kaki lima ps. Terbakar bangko | Rp 500 /M2 per hari |
| | f. Payung tempat jualan | Rp 2.000 /payung per hari |
| | g. Papan tempat jualan 2 x2 m | Rp 2.000 /hari |
| | h. Pasar Baya Jl. Kadipan : | |
| | - Kios Pasar baya | Rp 1.200 /M2 per hari |
| | - Los Pasar Baya | Rp 600 /M2 per hari |
| | i. Pasar Parak Kelapo : | |
| | - Kios parak kelapo | Rp 1.200 /M2 per hari |
| | - Los sayur bawah | Rp 750 /M2 per hari |
| | - Los ikan/ayam potong | Rp 750 /M2 per hari |
| | - Los daging | Rp 1.200 /M2 per hari |
| 2 | Pasar Baru Bangko : | |
| | a. Kios pasar baru | Rp 1.500 /M2 per hari |
| | b. Los Pasar ikan/ayam potong | Rp 750 /M2 per hari |
| | c. Los pasar sayur | Rp 750 /M2 per hari |

| | | |
|----|----------------------------|--------------------------|
| | d. Los sayur | Rp 500 /M2 per hari |
| | e. Los grosir sayur | Rp 1.000 /petak per hari |
| | f. Kios Daging | Rp 1.500 /M2 per hari |
| 3 | Pasar Rantau panjang : | |
| | a. Pasar Inpres | Rp 800 /M2 per hari |
| | b. Pasar baru tabir | Rp 800 /M2 per hari |
| | c. Pasar Ex.Marga | Rp 700 /M2 per hari |
| | d. Kios Pasar semayo | Rp 700 /M2 per hari |
| 4 | Pasar Tabir selatan : | |
| | a. Kios Pasar Muara delang | Rp 800 /M2 per hari |
| 5 | Pasar Pamenang : | |
| | a. Los Permanen | Rp 800 /M2 per hari |
| | b. Los Semi Permanen | Rp 700 /M2 per hari |
| | c. Kios permanen depan | Rp 1.200 /M2 per hari |
| | d. Los permanen belakang | Rp 900 /M2 per hari |
| | e. Kios Ex. Marga | Rp 900 /M2 per hari |
| 6 | Pasar Sungai Manau : | |
| | a. Los Permanen | Rp 800 /M2 per hari |
| | b. Los Semi Permanen | Rp 700 /M2 per hari |
| | c. Kios permanen depan | Rp 1.000 /M2 per hari |
| | d. Kios permanen lainnya | Rp 900 /M2 per hari |
| 7 | Pasar Masurai : | |
| | a. Los Permanen | Rp 800 /M2 per hari |
| | b. Los Semi Permanen | Rp 700 /M2 per hari |
| | c. Kios permanen depan | Rp 1.000 /M2 per hari |
| | d. Kios permanen lainnya | Rp 900 /M2 per hari |
| 8 | Pasar Muara Siau : | |
| | a. Los Permanen | Rp 800 /M2 per hari |
| | b. Los Semi Permanen | Rp 700 /M2 per hari |
| 9 | Pasar Rakyat Tipe A | |
| | a. Kios uk. 2 x 2 | Rp 1.500 /M2 per hari |
| | b. Kios uk. 2 x 3 | Rp 1.500 /M2 per hari |
| 10 | Pasar Harian/Balai/Pekan | Rp 2.000 /hari |

Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI



Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Alex Sander Mandala Putra, SH
NIP. 19751208 200501 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA GROSIR, PERTOKOAN/RUKO DAN TEMPAT USAHA LAINNYA

| Struktur | | Tarif |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | Kios Terminal : | |
| | a. Loket Angdes | Rp 500 /M2 per hari |
| | b. Rumah Makan/los/warung Angdes | Rp 500 /M2 per hari |
| 2 | Pasar Musiman | Rp 20.000 / lapak per hari |
| 3 | Kantin Jam Gento | Rp 700 /M2 per hari |
| 4 | Kantin PKK | Rp 1.000 /M2 per hari |
| 5 | Kantin Lesehan : | |
| | a. Lesehan PKK | Rp 600 /M2 per hari |
| | b. Pujasera | Rp 500 /M2 per hari |
| 6 | Ruko : | |
| | Jl. Syamsuddin Uban | Rp 850 /M2 per hari |
| | Jl. M.Duad | Rp 850 /M2 per hari |

2. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

| Struktur | | Tarif |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Pelelangan Hasil Ternak : | |
| | a. Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp 25.000 Per hari |
| | b. Kambing, Domba , Babi | Rp 15.000 Per hari |
| 2 | Pelelangan Ikan | Rp 15.000 Per hari |
| 3 | Pelelangan Hasil Bumi/Hutan | Rp 15.000 Per hari |

3. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

| Struktur | | Tarif |
|----------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | Pasar Baru | |
| | a. Kendaraan Roda Dua | Rp 2.000 /unit per 1 x parkir |
| | b. Kendaraan Roda empat | Rp 3.000 /unit per 1 x parkir |
| | c. Kendaraan Roda enam | Rp 4.000 /unit per 1 x parkir |

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2 | Parkir langganan | |
| | a. Kendaraan Roda Dua | Rp 5.000 /unit per bulan |
| | b. Kendaraan Roda empat | Rp 10.000 /unit per bulan |
| | c. Kendaraan Roda enam | Rp 15.000 /unit per bulan |
| 3 | Parkir Pasar rakyat | |
| | a. Kendaraan Roda Dua | Rp 2.000 /unit per 1 x parkir |
| | b. Kendaraan Roda empat | Rp 3.000 /unit per 1 x parkir |
| | c. Kendaraan Roda enam | Rp 4.000 /unit per 1 x parkir |
| 4 | Tempat Khusus Parkir (Perusahaan/Pabrik/lahan parkir lainnya) | |
| | a. Kendaraan Roda Dua | Rp 2.000 /unit per 1 x parkir |
| | b. Kendaraan Roda empat | Rp 3.000 /unit per 1 x parkir |
| | c. Kendaraan Roda enam | Rp 4.000 /unit per 1 x parkir |
| | d. Kendaraan Roda Sepuluh | Rp 5.000 /unit per 1 x parkir |
| 5 | Parkir Khusus Tempat Wisata | |
| | a. Roda Dua | Rp 5.000 /unit per 1 x parkir |
| | b. Roda Empat | Rp 10.000 /unit per 1 x parkir |
| | c. Roda Enam | Rp 15.000 /unit per 1 x parkir |

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGRAHAN/VILA

| Struktur | | Tarif |
|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | Mess Milik Pemda | |
| | a. Kamar Non AC | Rp 100.000 /malam |
| | b. Kamar AC | Rp 150.000 /malam |
| | c. Extra bad | Rp 50.000 /malam |
| 2 | Kemping | |
| | a. Tenda : | |
| | - Kapasitas 2 org | Rp 25.000 /malam |
| | - Kapasitas 4 org | Rp 35.000 /malam |
| | - Kapasitas 6 org | Rp 65.000 /malam |
| | b. Matras spoon | Rp 10.000 /unit |
| | c. Sleeping bag | Rp 15.000 /unit |
| | d. Lentera tenda | Rp 5.000 /unit |
| e. Kompor gas portabel | Rp 10.000 /unit | |
| 3 | Pondok Wisata | Rp 200.000 /unit per malam |

5. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

| Struktur | | Tarif |
|----------|--------------------------|------------------|
| 1 | Biaya pemotongan hewan : | |
| | a. Sapi, Kerbau dan Kuda | Rp 100.000 /ekor |
| | b. Kambing, Domba , Babi | Rp 45.000 /ekor |
| | c. Unggas | Rp 1.000 /ekor |

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2 | Biaya penyewaan tempat pelayuan daging | Rp 10.000 /ekor |
| 3 | Biaya pelayanan dan pengangkutan daging | Rp 100.000 /ekor |
| 4 | Hewan yang dipotong untuk keperluan adat,kecuali aqiqah dan kurban (pemotongan diluar rumah potong hewan) dikenakan biaya pemeriksaan Antemortem dan Postmortem pada sapi kerbau | Rp 100.000 /ekor |

6. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

| Struktur | | Tarif |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tempat Olah Raga : | |
| | a. Gedung Olahraga (Jalur 2 Kodim) | Rp 150.000 /hari |
| | b. Lapangan Koni/Hijau | Rp 100.000 /jam |
| | c. Lapangan tenis | Rp 100.000 /hari |
| | d. Hall Bulutangkis | Rp 100.000 /jam |
| 2 | Tempat Rekreasi/Objek Wisata : | |
| | a. Arboretum Rio Alip : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | b. Bukit tiung : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | c. Danah pauh : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | d. Danau Depati empat : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| e. Goa Tiongko : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| f. Goa Sengayau : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| g. Goa Sengiring : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| h. Air Terjun Serincing : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| i. Teluk Wang Sakti : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| j. Air panas grao sakti : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| k. Air terjun telun perentak : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| l. Taman batu : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| m. Mangkarang purba : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| n. Air terjun 7 bidadari : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| o. Air terjun dukuh betuah : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| p. Air terjun muara karing : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| q. Batu tulis : | |
| Wisatawan Lokal : | |
| - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| Wisatawan Asing : | |
| - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |

| | | |
|---|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | r. Batu larung Nilo Dingin, Dusun Tuo Lembah Masurai : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per masuk |
| | s. Tracking (pendakian gunung) : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | t. Telaga biru : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | u. Lematang : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| | v. Taman Siti Rahmah : | |
| | Wisatawan Lokal : | |
| | - Anak Anak | Rp 5.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 10.000 /org per 1x masuk |
| | Wisatawan Asing : | |
| | - Anak Anak | Rp 20.000 /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp 25.000 /org per 1x masuk |
| 3 | Fasilitas Pariwisata : | |
| | a. Buaian keliling | Rp 5.000 /org per 10 menit |
| | b. Sepeda Air | Rp 10.000 /org per 15 menit |
| | c. Perahu Wisata (speedboat) | Rp 15.000 /org/1 x putaran |

| | | | | |
|----|--------------------------|----|-----------|-------------------|
| d. | Los Niaga | Rp | 5.000 | /M2/org/hr/org |
| e. | Lapak Niaga keliling | Rp | 5.000 | /M2/org/hr/org |
| f. | Perahu Karet Arung Jeram | Rp | 650.000 | /perahu/lintasan |
| g. | Menara Pandang | Rp | 3.000 | /org per 1 x naik |
| h. | Lapangan Road Race : | | | |
| | - Event Swasta | Rp | 7.500.000 | / 1 x event |
| | - Pemerintah | Rp | 5.000.000 | / 1 x event |
| i. | Outbound : | | | |
| | <i>Wisatawan Lokal :</i> | | | |
| | - Anak Anak | Rp | 5.000 | /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp | 10.000 | /org per 1x masuk |
| | <i>Wisatawan Asing :</i> | | | |
| | - Anak Anak | Rp | 20.000 | /org per 1x masuk |
| | - Dewasa | Rp | 25.000 | /org per 1x masuk |

7. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG/BARANG MENGGUNAKAN KENDARAAN AIR

| Struktur | | Tarif | |
|----------------------|------------------|-------|---------------|
| Penyeberangan ponton | | | |
| a. | orang | Rp | 2.000 / orang |
| b. | kendaraan roda 2 | Rp | 10.000 / unit |
| c. | kendaraan roda 4 | Rp | 15.000 / unit |

8. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

| Struktur | | Tarif | |
|----------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| 1. | Kompos dari olahan sampah organik | Rp | 1.500 /kg |
| 2. | Cetak Kemasan Produksi Lokal | Rp | 1.000 /kemasan |
| 3. | Ternak Tidak layak Bibit : | | |
| a. | Sapi Bali | | |
| | - Ternak hasil Bumi | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |
| | - Ternak hasil IB | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |
| b. | Sapi Madura | | |
| | - Ternak hasil Bumi | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |
| | - Ternak hasil IB | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |
| c. | Sapi Po/BC | | |
| | - Ternak hasil Bumi | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |
| | - Ternak hasil IB | Rp | 70.000 /Kg per berat hidup |

| | | | | |
|-------|-----------------|--------------------------|--------------|----------------------------|
| | d. | Kerbau | | |
| | | - Ternak hasil Bumi | Rp | 80.000 /Kg per berat hidup |
| | | - Ternak hasil IB | Rp | 80.000 /Kg per berat hidup |
| | e. | Kambing/Domba | | |
| | | - Ternak hasil Bumi | Rp | 40.000 /Kg per berat hidup |
| | | - Ternak hasil IB | Rp | 40.000 /Kg per berat hidup |
| 4. | Bibit Tanaman : | | | |
| | a. | Bibit Sawit | Rp | 30.000 /batang |
| | b. | Benih Padi (ungu) | Rp | 12.000 /kg |
| | c. | Benih Palawija | Rp | 10.000 /kg |
| | d. | Benih Kentang (G2) | Rp | 10.000 /kg |
| | e. | Benih Bawang Merah | Rp | 12.000 /kg |
| | f. | Bibit Buah-buahan | Rp | 20.000 /batang |
| | g. | Bibit Sayur-sayuran | Rp | 10.000 /kg |
| 5. | Benih Ikan : | | | |
| | a. | Ikan Mas : | | |
| | | 3-5 cm | Rp | 200 /cm /ekor |
| | | 5-8 cm | Rp | 225 /cm/ekor |
| | | 8-12 cm | Rp | 300 /cm/ekor |
| | b. | Ikan Nila : | | |
| | | 3-5 cm | Rp | 150 /cm/ekor |
| | | 5-8 cm | Rp | 175 /cm/ekor |
| | | 8-12 cm | Rp | 275 /cm/ekor |
| | c. | Ikan lele : | | |
| | | 2 Inc | Rp | 175 /cm/ ekor |
| | | 3 Inc | Rp | 250 /cm/ ekor |
| | | 4 Inc | Rp | 325 /cm/ ekor |
| | d. | Ikan Gurami : | | |
| | | 3-5 cm | Rp | 1.500 /cm/ekor |
| | | 5-8 cm | Rp | 2.250 /cm/ekor |
| | | 8-12 cm | Rp | 3.500 /cm/ekor |
| | e. | Ikan Patin : | | |
| | | 2 Inc | Rp | 300 /cm/ekor |
| 3 Inc | | Rp | 375 /cm/ekor | |
| 4 Inc | | Rp | 400 /cm/ekor | |
| 6. | Budidaya Ikan : | | | |
| | a. | Ikan Patin : | | |
| | | Calon indukan (0,5-1 Kg) | Rp | 60.000 /ekor |
| | | Induk (>1,5 kg) | Rp | 105.000 /ekor |
| | | Pembesaran | Rp. | 18.000 /Kg |
| | | Afkir | Rp. | 15.000 /Kg |

| | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| | b. | Ikan lele : | |
| | | <i>Calon indukan</i> | Rp 25.000 /ekor |
| | | <i>Induk</i> | Rp 65.000 /ekor |
| | | <i>Pembesaran</i> | Rp. 15.000 /Kg |
| | | <i>Afkir</i> | Rp. 12.500 /Kg |
| | c. | Ikan Nila : | |
| | | <i>Calon indukan</i> | Rp 5.500 /ekor |
| | | <i>Induk</i> | Rp 15.000 /ekor |
| | | <i>Pembesaran</i> | Rp. 25.000 /Kg |
| | | <i>Afkir</i> | Rp. 20.000 /Kg |
| | d. | Ikan Mas : | |
| | | <i>Calon indukan (0,5-1 Kg)</i> | Rp 23.000 /ekor |
| | | <i>Induk (>1,5 kg)</i> | Rp 75.000 /ekor |
| | | <i>Pembesaran</i> | Rp. 25.000 /Kg |
| | | <i>Afkir</i> | Rp. 20.000 /Kg |
| | e. | Ikan Gurami : | |
| <i>Calon indukan</i> | | Rp 65.000 /ekor | |
| <i>Induk</i> | | Rp 90.000 /ekor | |
| <i>Pembesaran</i> | | Rp. 40.000 /Kg | |
| | <i>Afkir</i> | Rp. 25.000 /Kg | |
| 7. | Kolam Pemancingan Ex.BBI Sungai Ulak (Ikan Hasil Pancing): | | |
| | a. | Ikan Patin | Rp. 15.000 /Kg |
| | b. | Ikan lele | Rp. 12.500 /Kg |
| | c. | Ikan Nila | Rp. 20.000 /Kg |
| | d. | Ikan Mas | Rp. 20.000 /Kg |
| | e. | Ikan Gurami | Rp. 25.000 /Kg |
| 8 | Laboratorium Pekerja Umum : | | |
| | a. | Kadar Air Tanah | Rp 25.000 /sampel |
| | b. | Kadar Air Agregat | Rp 25.000 /sampel |
| | c. | Gradasi Agregat | Rp 75.000 /sampel |
| | d. | Berat Jenis agregat Kasar | Rp 75.000 /sampel |
| | e. | Berat Jenis agregat Halus | Rp 75.000 /sampel |
| | f. | Organik empriti pemadatan | Rp 30.000 /sampel |
| | g. | Modified Agregat | Rp 80.000 /set |
| | h. | Kuat Tekanan Beton | Rp 25.000 /sampel |
| | i. | Hammer test | Rp 25.000 /sampel |
| | j. | Sondir | Rp 325.000 /sampel |
| | k. | Mix design aspal burda/burtu core | Rp 350.000 /sampel |
| | l. | Drillk Aspal | Rp 100.000 /sampel |
| | m. | CBR Lapangan | Rp 50.000 /sampel |
| | n. | DCP | Rp 20.000 /sampel |
| o. | Sand Cone | Rp 70.000 /sampel | |
| p. | Marshal Test | Rp 55.000 /sampel | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------|-----------------|
| | q. | Slump Test | Rp | 25.000 | /sampel |
| | r. | Hand Bor | Rp | 40.000 | /meter |
| | s. | UCS | Rp | 40.000 | /sampel |
| | t. | Konsolidasi | Rp | 50.000 | /sampel |
| | u. | Direct sheart | Rp | 30.000 | /sampel |
| | v. | Berat Jenis Tanah | Rp | 20.000 | /sampel |
| | w. | Atterberg limit tanah | Rp | 20.000 | /sampel |
| | x. | Analisa Saringan Tanah | Rp | 20.000 | /sampel |
| | y. | Pemadatan Standar | Rp | 80.000 | /sampel |
| | z. | Pemadatan modified | Rp | 80.000 | /sampel |
| | aa. | CBR standar laboratorium | Rp | 80.000 | /set |
| | bb. | CBR midified | Rp | 80.000 | /set |
| | cc. | Mix design tanah timbunan | Rp | 500.000 | /sampel |
| | dd. | Abrasi Agregat | Rp | 75.000 | /sampel |
| | ee. | CBR modified agragat | Rp | 80.000 | /set |
| | ff. | Ekstrasi campuran aspal | Rp | 80.000 | /sampel |
| | gg. | Berat isi Aspal | Rp | 50.000 | /sampel |
| | hh. | Mix design aspal beton | Rp | 300.000 | /sampel |
| | ii. | Mix design beton | Rp | 300.000 | /sampel |
| | jj. | Mix design agregat kelas ABC | Rp | 300.000 | /sampel |
| | kk. | Sound equavalenti | Rp | 40.000 | /sampel |
| | ll. | Alat ukur water pas/topcon | Rp | 75.000 | /hari |
| | mm. | Cutter Aspal | Rp | 150.000 | /hari |
| | nn. | Core Drill Vertikal Harizontal | Rp | 150.000 | /sampel |
| | oo. | Test Pit Kelas A, B, C | Rp | 50.000 | /sampel |
| | pp. | Jak Hamer | Rp | 200.000 | /m ² |
| | qq. | Cutter Aspal / Beton | Rp | 100.000 | /m ² |
| 9 | Laboratorium Lingkungan Hidup : | | | | |
| | a. | Jasa Sampling : | | | |
| | | Pengambilan Sampel Air dan limbah : | | | |
| | | - Dalam Kec. Bangko | Rp | 2.350.000 | / paket |
| | | - Luar Kec. Bangko | Rp | 2.500.000 | / paket |
| | | Pengambilan Sampel Udara : | | | |
| | | - Dalam Kec. Bangko | Rp | 2.350.000 | / paket |
| | | - Luar Kec. Bangko | Rp | 2.500.000 | / paket |
| | b. | Jasa Pengujian Parameter : | | | |
| | | - pH | Rp | 10.000 | / sampel |
| | | - Daya Hantar Listrik | Rp | 10.000 | / sampel |
| | | - Kekeruhan | Rp | 31.500 | / sampel |
| | | - Kesadahan Kalsium (CaCO ₃) | Rp | 42.000 | / sampel |
| | | - Kesadahan Magnesium (CaCO ₃) | Rp | 42.000 | / sampel |
| | | - Kesadahan Total (CaCO ₃) | Rp | 60.000 | / sampel |

| | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| - Clorida (Cl) | Rp 42.000 / sampel |
| - Oksigen Terlarut (DO) | Rp 47.000 / sampel |
| - Salinitas | Rp 10.000 / sampel |
| - Temperatur (suhu) | Rp 10.000 / sampel |
| - Zat Padat Terlarut (TDS) | Rp 58.000 / sampel |
| - Zat Padat Tersuspensi (TSS) | Rp 75.000 / sampel |
| - Alumunium (Al) | Rp 58.000 / sampel |
| - Antimoni (Sb) | Rp 123.000 / sampel |
| - Barium (Ba) | Rp 123.000 / sampel |
| - Kromium (Cr) | Rp 123.000 / sampel |
| - Merkuri (Hg) | Rp 123.000 / sampel |
| - Magnesium (Mg) | Rp 146.000 / sampel |
| - Kalium (K) | Rp 123.000 / sampel |
| - Kalsium (Ca) | Rp 123.000 / sampel |
| - Natrium (Na) | Rp 123.000 / sampel |
| - Restruksi Cd,Fe,Cu,Ni,Zn,Pb,Ag,Co,Mn | Rp 99.000 / sampel |
| - Arsen (As_2O_3) | Rp 180.000 / sampel |
| - Selenium (SE) | Rp 180.000 / sampel |
| - Kadmium (Cd) | Rp 50.000 / sampel |
| - Besi (Fe) | Rp 50.000 / sampel |
| - Tembaga (Cu) | Rp 350.000 / sampel |
| - Timbal (Pb) | Rp 350.000 / sampel |
| - Nikel (Ni) | Rp 350.000 / sampel |
| - Besi (Fe) | Rp 350.000 / sampel |
| - Seng (Zn) | Rp 350.000 / sampel |
| - Perak (Ag) | Rp 350.000 / sampel |
| - Mangan (Mn) | Rp 350.000 / sampel |
| - Amoniak (NH_3) | Rp 100.000 / sampel |
| - Boron (B) | Rp 126.000 / sampel |
| - Florida (F) | Rp 84.000 / sampel |
| - Nitrat (NO_3) | Rp 120.000 / sampel |
| - Nitrit (NO_2) | Rp 65.000 / sampel |
| - N. Total | Rp 95.000 / sampel |
| - Total Fosfor | Rp 89.000 / sampel |
| - Sianida (CN) | Rp 110.000 / sampel |
| - Sulfat (H_2SO_4) | Rp 53.000 / sampel |
| - Sulfida (S^{2-}) | Rp 53.000 / sampel |
| - BOD | Rp 170.000 / sampel |
| - COD | Rp 84.000 / sampel |
| - Fenol (C_6H_5OH) | Rp 150.000 / sampel |
| - Detergen M-BAS | Rp 263.000 / sampel |
| - Minyak & Lemak | Rp 126.000 / sampel |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| - Coliform | Rp 300.000 | / sampel |
| - E. Colie | Rp 350.000 | / sampel |
| c. Jasa Pengujian Udara Ambien : | | |
| - Ammonia (NH ₃) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Hidrogen Sulfida (H ₂ S) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Hidrogen Peroksida (H ₂ O ₂) | Rp 194.000 | / sampel |
| - PM ₁₀ | Rp 194.000 | / sampel |
| - PM ₂₅ | Rp 194.000 | / sampel |
| - Karbon Monoksida (CO) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Nitrogen Dioksida (NO ₂) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Oksigen (O ₂) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Sulfur Dioksida (SO ₂) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Timah Hitam (Pb) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Total Partikulat (TSP) – Debu | Rp 194.000 | / sampel |
| - Total Flourides (sebagai F) | Rp 194.000 | / sampel |
| - Flour indeks | Rp 194.000 | / sampel |
| - Khorin & Klorine Dioksida | Rp 194.000 | / sampel |
| - Sulphat Indeks | Rp 194.000 | / sampel |
| - Passive sampler | Rp 120.000 | / sampel |
| - Dust Fall | Rp 150.000 | / sampel |
| - Temperatur dan kelembaban Metode Hygrometer | Rp 194.000 | / sampel |
| - Kecepatan angin Metode Anemometer | Rp 200.000 | / sampel |
| d. Jasa Pengukuran Kebisingan : | | |
| - Kebisingan Lingkungan | Rp 120.000 | / sampel |
| - Kontur kebisingan untuk tenga kerja | Rp 80.000 | / sampel |
| - Vibrasi Lingkungan untuk kenyamanan dan kesehatan | Rp 450.000 | / sampel |
| - Noise kriteria indoor | Rp 220.000 | / sampel |
| - Emisi bising kendaraan bermotor secara statis | Rp 650.000 | / sampel |
| - Emisi bising kendaraan bermotor secara dinamis : | | |
| Sepeda Motor | Rp 1.000.000 | / sampel |
| Mobil | Rp 1.750.000 | / sampel |
| e. Jasa Pengujian Udara Emisi : | | |
| - Total partikulat (TSP) – Debu | Rp 240.000 | / sampel |
| - Total Reduced Sulfur (TRS) sebagai H ₂ S | Rp 240.000 | / sampel |
| - Klorin (Cl ₂) | Rp 180.000 | / sampel |
| - Klorin dioksida (ClO ₂) | Rp 180.000 | / sampel |
| - Komposisi Gas (CO,NO,NO ₂ ,SO ₂ ,NO _x) | Rp 300.000 | / sampel |
| - Ammonia (NH ₃) | Rp 180.000 | / sampel |
| - Hidrogen Khlorida (HCl) | Rp 180.000 | / sampel |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - Hydrogen Florida (HF) | Rp 180.000 / sampel |
| - Opasitas | Rp 60.000 / sampel |
| - Kobalt (Co) | Rp 40.000 / sampel |
| - Cadmium (Cd) | Rp 40.000 / sampel |
| - Tembaga (Cu) | Rp 45.000 / sampel |
| - Selenium (Se) | Rp 40.000 / sampel |
| - Seng (Zn) | Rp 60.000 / sampel |
| - Stanum (Sn) | Rp 60.000 / sampel |
| - Timah Hitam (Pb) | Rp 40.000 / sampel |
| - Arsen (As) | Rp 70.000 / sampel |
| - Hidrogen Sulfida (H ₂ S) | Rp 180.000 / sampel |
| - NOx Metode PDS | Rp 180.000 / sampel |
| - Sulfur Dioksida (SO ₂) | Rp 194.000 / sampel |
| - Komposisi Gas (CO ₂ ,CO,O ₂) dengan metode gas analyzer, temperature, laju air gas dan kadar air | Rp 230.000 / sampel |
| - Komposisi Gas (CO ₂ ,CO,O ₂) dengan metode gas analyzer | Rp 200.000 / sampel |
| - Kadar air | Rp 100.000 / sampel |
| - Laju alir Gas | Rp 100.000 / sampel |
| - Merkuri (Hg) | Rp 224.000 / sampel |
| - Hidrocarbon (HC)-CH ₄ | Rp 200.000 / sampel |

9. PEMANFAATAN ASET DAERAH/KEKAYAAN DAERAH

| | Struktur | Tarif |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Gedung Pertemuan/Gedung Serba Guna/Anjungan Perahu Ujung Tanjung/ Gedung lainnya : | |
| | a. Digunakan Perorangan/Badan Hukum bersifat Komersil : | |
| | - Siang Hari | Rp 700.000 / 1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 900.000 / 1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 1.200.000 / 1 x Pakai |
| | b. Digunakan Instasansi Pemerintah Sipil, Militer, Polri, Organisasi Politik bersifat Umum : | |
| | - Siang Hari | Rp 450.000 / 1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 600.000 / 1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 750.000 / 1 x Pakai |
| | Gedung Pertemuan UMKM | |
| | a. Digunakan Perorangan/Badan Hukum bersifat Komersil : | |
| | - Siang Hari | Rp 700.000 / 1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 900.000 / 1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 1.200.000 / 1 x Pakai |

| | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| | b. Digunakan Instasansi Pemerintah Sipil, Militer, Polri, Organisasi Politik bersifat Umum : | |
| | - Siang Hari | Rp 450.000 /1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 600.000 /1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 750.000 /1 x Pakai |
| | Pemakaian gedung melebihi ketentuan lebih dari 12 jam atau lebih dari 24 jam dikenakan biaya tambahan | Rp 350.000 |
| 2 | Gedung Olahraga/Lapangan Koni/Lapangan Hijau : | |
| | a. Digunakan Perorangan/Badan Hukum bersifat Komersil : | |
| | - Siang Hari | Rp 1.000.000 /1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 1.500.000 /1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 2.000.000 /1 x Pakai |
| | b. Digunakan Instasansi Pemerintah Sipil, Militer, Polri, Organisasi Politik bersifat Umum : | |
| | - Siang Hari | Rp 500.000 /1 x Pakai |
| | - Malam Hari | Rp 750.000 /1 x Pakai |
| | - Siang dan Malam Hari | Rp 1.000.000 /1 x Pakai |
| | Pemakaian gedung melebihi ketentuan lebih dari 12 jam atau lebih dari 24 jam dikenakan biaya tambahan | Rp 350.000 |
| 3 | Pengelolaan Gedung Industri Kopi | |
| | - Pengolahan Biji Kopi | Rp 42.000 /jam |
| 4 | Kolam Ikan Ex BBI Sungai Ulak | Rp 1.000.000 /kolam per tahun |
| 5 | Pemakaian Alat Musik dan Peralatan Lainnya : | |
| | a. Organ Tunggal : | |
| | - Dalam kota siang hari | Rp 700.000 /1 x main |
| | - Dalam kota Malam hari | Rp 1.000.000 /1 x main |
| | - Luar kota siang hari | Rp 1.250.000 /1 x main |
| | - Luar kota malam hari | Rp 1.500.000 /1 x main |
| | b. Peralatan dan Perlengkapan : | |
| | Dalam Kota : | |
| | - Sound sistem lengkap | Rp 500.000 /1 x Pakai |
| | - Ginset | Rp 300.000 /1 x Pakai |
| | - Tenda | Rp 200.000 /unit untuk 1 x pakai |
| | - Kursi | Rp 500 /unit |
| | - Panggung | Rp 300.000 /1 x Pakai |

| | | |
|----|------------------------------------|------------------------------------|
| | Luar Kota : | |
| | - Sound sistem lengkap | Rp 600.000 / 1 x Pakai |
| | - Ginset | Rp 400.000 / 1 x Pakai |
| | - Tenda | Rp 300.000 /unit untuk 1 x pakai |
| | - Kursi | Rp 700 /unit |
| | - Panggung | Rp 350.000 / 1 x Pakai |
| 6 | Alat Berat Pekerjaan Umum : | |
| | a. Motor Grader : | Rp 2.400.000 /hari |
| | b. Excavator : | Rp 2.100.000 /hari |
| | c. Vibro Roller : | Rp 1.200.000 /hari |
| | d. Beckoe Loder : | Rp 1.150.000 /hari |
| | e. Tronton : | Rp 1.100.000 /hari |
| | f. Tandem Roller : | Rp 760.000 /hari |
| | g. Dump Truck : | Rp 380.000 /hari |
| 7 | Alat dan Mesin Pertanian : | |
| | a. Pengolahan Tanah : | |
| | Traktor roda 4 : | |
| | - Pengolahan Lahan dengan Bajak | Rp 1.000.000 /hektar |
| | - Pengolahan Lahan dengan rotari | Rp 750.000 /hektar |
| | - Pengolahan bedengan tanaman | Rp 500.000 /hektar |
| | b. Exavator mini | Rp 1.250.000 /hari |
| 8 | Gudang Penyimpanan Hasil Pertanian | Rp 500.000 /bulan |
| 9 | Bus : | |
| | a. Micro / Elf/ Engkel (AC) | |
| | - Dalam Kabupaten Merangin | Rp 200.000 /hari |
| | - Luar Kabupaten Merangin | Rp 400.000 /hari |
| | b. Bus 3/4 (AC) | |
| | - Dalam Kabupaten Merangin | Rp 300.000 /hari |
| | - Luar Kabupaten Merangin | Rp 500.000 /hari |
| 10 | Baliho/Papan Reklame : | |
| | a. Untuk Komersil | Rp 2.000 / m ² per hari |
| | b. Untuk Non Komersil | Rp 1.300 / m ² per hari |
| 11 | Rumah Hunian/Rusun | |
| | a. Hunian Lantai 1 | Rp. 370.000 / bulan |
| | b. Hunian Lantai 2 | Rp. 345.000 / bulan |
| | c. Hunian Lantai 3 | Rp. 320.000 / bulan |
| | d. Hunian Lantai 4 | Rp. 295.000 / bulan |
| | e. Hunian Lantai 5 | Rp. 270.000 / bulan |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | f. Ruang untuk Usaha : | |
| | - Komersil 1 | Rp. 180.000 / bulan |
| | - Komersil 2 | Rp. 350.000 / bulan |
| 12 | Keramba Ikan Dam Betuk | Rp 500.000 / bulan per keramba |
| 13 | Lahan/Tanah Kosong : | |
| | a. Olahahan untuk Pertanian (maks. lahan olahahan 2.500 m2) | Rp 1.500 / m2 per tahun |
| | b. Tanah Kosong : | |
| | - Non Komersil (hunian Non Permanen) (maks. luas 300 m2) | Rp 500 / m2 per bulan |
| | - Komersil (maks. Luas 100 m2) | Rp 1.500 / m2 per bulan |

Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI



Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Alex Sander Mandala Putra, SH
NIP. 19751208 200501 1 004

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg}$$

- Prasarana Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\mathbf{V \times I \times Ibg \times HSpbg}$$

- Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\mathbf{If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm}$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST):

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp 5.610.000/m².

C. Indeks Lokalitas (Ilo):

- 1) Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk fungsi hunian.
- 2) Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma lima persen) untuk fungsi usaha, fungsi sosial budaya, fungsi ganda/campuran, fungsi khusus dan fungsi keagamaan.

D. Indeks Terintegrasi (It) :

| Fungsi | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi | Bobot Parameter (bp) | Parameter | Indeks Parameter (Ip) |
|------------------------|--------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Usaha | 0,7 | Kompleksitas | 0,3 | a. Sederhana b. Tidak sederhana | 1 2 |
| Usaha (UMKM-Prototipe) | 0,5 | Permanen | 0,2 | a. Non Permanen b. Permanen | 1 2 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Hunian a. <100 M ² dan <2 lantai | 0,15 | Ketinggian | 0,5 | *) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai | *) mengikuti tabel koefisien jumlah lantai |
| b. >100 M ² dan >2 lantai | 0,17 | | | | |
| Keagamaan | 0 | | | | |
| Fungsi khusus | 1 | Faktor Kepemilikan (Fm) | | a. Negara b. Perorangan /Badan usaha | 0 1 |
| Sosial budaya | 0,3 | | | | |
| Ganda/ Campuran luas a. <500 M ² dan <2 lantai | 0,6 | | | | |
| b. >500 M ² dan >2 lantai | 0,8 | | | | |

E. Tabel Koefisien Jumlah Lantai :

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|--------------------------|-------------------------|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393+0,1 (n) |
| Basemen 3 lapis | 1,393 |
| Basemen 2 lapis | 1,299 |
| Basemen 1 lapis | 1,197 |
| 1 | 1 |
| 2 | 1,090 |
| 3 | 1,120 |
| 4 | 1,135 |
| 5 | 1,162 |
| 6 | 1,197 |
| 7 | 1,236 |
| 8 | 1,265 |
| 9 | 1,299 |
| 10 | 1,333 |
| 11 | 1,364 |
| 12 | 1,393 |
| 13 | 1,420 |
| 14 | 1,445 |
| 15 | 1,468 |
| 16 | 1,489 |
| 17 | 1,508 |
| 18 | 1,525 |
| 19 | 1,541 |
| 20 | 1,556 |
| 22 | 1,584 |
| 23 | 1,597 |
| 24 | 1,610 |
| 25 | 1,622 |
| 26 | 1,634 |
| 27 | 1,645 |
| 28 | 1,656 |
| 29 | 1,666 |
| 30 | 1,676 |

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|---------------|-------------------------|
| 31 | 1,686 |
| 32 | 1,695 |
| 33 | 1,704 |
| 34 | 1,713 |
| 35 | 1,722 |
| 36 | 1,730 |
| 37 | 1,738 |
| 38 | 1,746 |
| 39 | 1,754 |
| 40 | 1,761 |
| 41 | 1,768 |
| 42 | 1,775 |
| 43 | 1,782 |
| 44 | 1,789 |
| 45 | 1,795 |
| 46 | 1,801 |
| 47 | 1,807 |
| 48 | 1,813 |
| 49 | 1,818 |
| 50 | 1,823 |
| 51 | 1,828 |
| 52 | 1,833 |
| 53 | 1,837 |
| 54 | 1,841 |
| 55 | 1,845 |
| 56 | 1,849 |
| 57 | 1,853 |
| 58 | 1,856 |
| 59 | 1,859 |
| 60 | 1,862 |
| 60+(n) | 1,862 + 0,003 (n) |

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (\text{LLi} \times \text{KL})) + \sum (\text{LBi} \times \text{KBi})}{(\sum \text{LLi} + \sum \text{LBi})}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg):

| Jenis Pembangunan | | Indeks Bangunan Terbangun |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Baru | 1 |
| 2 | Rehabilitasi/Renovasi : | |
| | a. Sedang | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | b. Berat | 0,65 x 50% = 0,325 |
| 3 | Pelestarian/Pemugaran | |
| | a. Pratama | 0,65 x 50% = 0,325 |
| | b. Madya | 0,45 x 50% = 0,225 |
| | c. Utama | 0,30 x 50% = 0,150 |

G. Contoh perhitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi kasus fungsi hunian :

1. Hunian rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Merangin

Data Bangunan :

Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Merangin
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG sederhana : Rp. 5.610.000
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%

| Fungsi | Indeks | bp x lp | Klasifikasi dan Parameter |
|--------------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Rumah tinggal | 0,15 | 0,3 x 1 = 0,3 | Kompleksitas : sederhana |
| | | 0,20 x 2,00 = 0,40 | Permanensi : permanen |
| | | 0,50 x 1,00 = 0,50 | Ketinggian : 1 lantai |
| | | $\sum (bp \times lp) = 1,2$ | Kepemilikan : perorangan |
| Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 | | | |
| Indeks terintegrasi (It) = 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18 | | | |

Cara Perhitungan :

$$= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Indeks terbangun}$$

$$= 36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.610.000,-}) \times 0,18 \times 1$$

$$= \text{Rp.181.764,-}$$

2. Gedung Rumah Toko baru di Kabupaten Merangin

Data Bangunan :

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Merangin
 Kepemilikan : Pribadi
 SHST BG sederhana : Rp. 5.610.000
 Indeks Lokalitas : nilai 0,2%

| Fungsi | Indeks | bp x lp | Klasifikasi dan Parameter |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------|
| Usaha | 0,7 | 0,3 x 2 = 0,3 | Kompleksitas : Tidak sederhana |
| | | 0,20 x 2,00 = 0,40 | Permanensi : permanen |
| | | 0,50 x 1,12 = 0,56 | Ketinggian : 3 lantai |
| | | $\sum (bp \times lp) = 1,56$ | Kepemilikan : perorangan |
| Faktor kepemilikan (perorangan) = 1 | | | |
| Indeks terintegrasi (It) = 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092 | | | |

Cara Perhitungan :

$$= \text{Luas Total Lantai (LLt)} \times (\text{Indeks Lokalitas} \times \text{SHST}) \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Indeks terbangun}$$

$$= 738 \times (0,2\% \times \text{Rp.5.610.000,-}) \times 1,092 \times 1$$

$$= \text{Rp.9.042.153,-}$$

II. PRASARANA GEDUNG

| No | Jenis Prasarana | Bangunan | Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG}) Rp | Indeks Prasarana Bagunan Gedung (I) | | |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | BB | RB | RS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kontruksi Pembatas/penahan /pengaman | Pagar | 1.500/m | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Tanggul/retailing wall | 2.000/m | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Turap batas kaveling/persil | 1.500/m | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 2 | Kontruksi Penanda masuk | Gapura/penanda masuk | 6.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Gerbang | 5.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|--------------------|
| 3 | Konstruksi Perkerasan | Jalan | 3.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Lapangan Upacara | 2.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Lapangan Olahraga terbuka | 2.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 4 | Konstruksi Perkerasan aspal,benton | | 2.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 5 | Konstruksi Perkerasan grassblock | | 2.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 6 | Konstruksi Penghubung | Jembatan | 7.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Box culvert | 6.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 7 | Konstruksi Penghubung (jembatan antar gedung) | | 7.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 8 | Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang) | | 7.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 9 | Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/underpass) | | 7.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 10 | Konstruksi kolam/resevoir bawah tanah | Kolam | 3.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Kolam pengolahan air/resevoir bawah tanah | 5.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 11 | Kolam septic tank/ sumur resapan | | 6.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 12 | Konstruksi menara | Menara resevoir | 8.000/per 5 m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Cerobong | 8.000/per 5 m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 13 | Konstruksi menara air | | 8.000/per 5 m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 14 | Konstruksi Monumen | Tugu | 350.000/unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Patung | 350.000/unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------|--------------------|
| | | Di dalam persil | 500.000/ unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Di luar persil | 500.000/ unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 15 | Konstruksi Instalasi gardu (penambahan luas unit melebihi luas maksimal dikenakan biaya tambahan) | Instalasi listrik maks luas 10 m ² | 50.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Instalasi telepon/komunikasi maks. Luas 10 m ² | 65.000/ unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Instalasi pengolahan maks. Luas 10 m ² | 10.000/ unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Biaya tambahan > luasan maksimal | 5.000/ m ² | | | |
| 16 | Konstruksi Reklame/papan nama (penambahan luas unit melebihi luas maksimal dikenakan biaya tambahan) | Billboard papan iklan reklame maks. luas 8 m ² | 1.000.000 /Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Biaya tambahan > luasan maksimal | 200.000/ m ² | | | |
| | | Papan nama berdiri sendiri atau berupa tembok pagar maks. Luas 8 m ² | 400.000/ unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Biaya tambahan > luasan maksimal | 100.000/ m ² | | | |
| 17 | Fondasi mesin (diluar bangunan) | | 100.000/ Unit mesin | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 18 | Konstruksi Menara Televisi (penambahan ketinggian unit melebihi tinggi maksimal dikenakan biaya tambahan) | Ketinggian maks. 100 m selebihnya dihitung kelipatan | 1.500.000 /Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | | Biaya tambahan > tinggi maksimal | 50.000/ m ² | | | |
| 19 | Konstruksi Antena Radio | Standing tower dengan kontruksi 3-4 kaki | | | | |
| | | Ketinggian 25-50 m | 150.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 51-75 m | 250.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 76-100 m | 350.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 101-125 m | 400.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 126-150 m | 500.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Sistem guy wire/ bentang kawat | | | | |
| | | Ketinggian 0-50 m | 100.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 51-75 m | 200.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Ketinggian 76-100 m | 300.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | Diatas 100 m | 400.000/ Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| | | 20 | Konstruksi antena (Tower komunikasi) | Menara bersama | | |
| Ketinggian < 25 m | 4.000.000 /Unit | | | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| Ketinggian 25-50 m | 6.000.000 /Unit | | | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| Ketinggian > 50 m | 8.000.000 /Unit | | | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| Menara mandiri | | | | | | |
| Ketinggian < 25 m | 1.500.000 /Unit | | | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| Ketinggian 25-50 m | 3.500.000 /Unit | | | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|------|------------------|------------------|
| | | Ketinggian > 50 m | 5.000.000 /Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 21 | Tangki Bahan Bakar | | 1.000.000 /Unit | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50%= 0,225 |
| 23 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | Saluran | 2.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50% = 0,225 |
| | | Kolam tampung | 7.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50% = 0,225 |
| 24 | Konstruksi penyimpanan/silo | | 70.000/m ² | 1,00 | 0,65x50% = 0,325 | 0,45x50% = 0,225 |

Keterangan :

1. BB = Bangunan Baru
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung dan Garis Sempadan Bangunan ditetapkan oleh Bupati.

2. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

| Struktur | Tarif | Ket |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Dana Kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan | US\$ 100 /bulan per orang per jabatan | Pembayaran Retribusi harus tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah |

Keterangan:

- (1) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI



Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Alex Sander Mandala Putra, SH
NIP. 19751208 200501 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
 - b. besaran penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - c. besaran pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. besaran pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pj. BUPATI MERANGIN,

ttd

MUKTI



Salinan sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Alex Sander Mandala Putra, SH
NIP. 19751208 200501 1 004